

**DIKTAT**

# **EKONOMI MONETER DAN KEUANGAN ISLAM**



**Oleh**

**NURUL JANNAH, ME**  
**NIP. 19920217 201903 2 018**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
2020**

# **EKONOMI MONETER DAN KEUANGAN ISLAM**

**Oleh**

**NURUL JANNAH, ME**  
**NIP. 19920217 201903 2 018**

**KONSULTAN:**

**Dr. Hj. YENNI SAMRI JULIATI NST, MA**  
**NIP. 19790701 200912 2 003**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**2020**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan diktat ini dengan baik, shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia dari alam kegelapan kepada alam kemuliaan.

Penulisan diktat ini sebagai bahan perkuliahan yang menyajikan tentang Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam secara dasar dan umum untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Penulis berharap diktat ini dapat bermanfaat dalam mengkaji ilmu tentang Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya diktat Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala yang dilakukan dalam penulisan Diktat Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan diktat ini. Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dihadapan Allah Swt.

Penulis juga menyadari bahwa diktat yang sangat sederhana ini, masih banyak kekurangan dan kesalahan. karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan diktat ini. Dengan demikian, diktat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan oleh semua pihak.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2020

Penulis

Nurul Jannah, ME

NIP. 19920217 201903 2 018

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I Selayang Pandang Ekonomi dan Uang</b>	
A. Posisi Ekonomi Moneter dalam Ilmu Ekonomi .....	1
B. Ekonomi Moneter dan Stabilitas Ekonomi Makro.....	1
C. Defenisi Uang.....	1
D. Kriteria Uang.....	2
E. Fungsi dan Peran Uang .....	3
<b>BAB II Permintaan Uang</b>	
A. Teori Permintaan Uang Klasik.....	5
B. Teori Permintaan Uang Keynes .....	5
C. Teori Permintaan Uang Modern.....	6
<b>BAB III Penawaran Uang</b>	
A. Defenisi Penawaran Uang .....	8
B. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang.....	8
C. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang .....	9
D. Teori Penawaran Uang Tanpa Bank.....	10
E. Teori Penawaran Uang Modern .....	11
F. Kebijakan Bank Sentral Dalam Mengatur Penawaran Uang .....	12
<b>BAB IV Tingkat Bunga</b>	
A. Pengertian Suku Bunga.....	14
B. Fungsi Suku Bunga .....	14
C. Teori Suku Bunga .....	14
D. Tingkat Bunga Nominal.....	16
E. Tingkat Bunga Riil.....	16
F. Teori Paritas Tingkat Bunga .....	16
G. Faktor yang mempengaruhi suku bunga .....	17
H. Peran Suku Bunga dalam Perekonomian .....	18
<b>BAB V Peranan Bank dalam Pasar Uang</b>	
A. Pengertian Bank .....	19
B. Pengertian Pasar Uang .....	20
C. Peranan Bank Sebagai Perantara Uang .....	21
D. Peranan Bank Sebagai Pencipta Uang .....	23
E. Proses Transaksi Pasar Uang .....	24
<b>BAB VI Hakikat Riba</b>	
A. Pengertian Riba .....	26
B. Dasar Hukum Riba.....	26
C. Macam-macam Riba .....	28

D. Dampak Negatif Riba.....	29
E. Hikmah diharamkannya Riba.....	29
<b>BAB VII Kebijakan Moneter Konvensional</b>	
A. Teori Kebijakan Moneter .....	31
B. Fungsi Kebijakan Moneter .....	31
C. Tujuan Kebijakan Moneter .....	32
D. Jenis-jenis Kebijakan Moneter .....	33
E. Manajemen Kebijakan Moneter .....	33
F. Beberapa Masalah dalam Kebijakan Moneter .....	34
G. Kerangka Umum Kebijakan Moneter .....	36
H. Sasaran Akhir Kebijakan Moneter .....	36
I. Indikator Kebijakan Moneter .....	37
J. Instrumen Kebijakan Moneter.....	39
<b>BAB VIII Kebijakan Moneter Islam</b>	
A. Kebijakan Moneter Tanpa Bunga .....	42
B. Sejarah Kebijakan Moneter Islam .....	43
C. Manajemen Kebijakan Moneter Islam .....	44
D. Prinsip Kebijakan Moneter Islam.....	45
E. Sasaran dan Strategi Kebijakan Moneter Islam .....	46
F. Instrumen Kebijakan Moneter Islam.....	46
G. Kebijakan Moneter pada Masa Rasulullah SAW .....	49
H. Kebijakan Moneter Islam Menurut Mas'udul Alam Choudhury .....	50
<b>BAB IX Dual Financial System di Indonesia</b>	
A. Landasan Hukum Kebijakan Moneter Islam.....	51
B. Dual Financial System .....	51
C. Implementasi Dual Financial System di Indonesia .....	52
<b>BAB X Arah Pengembangan Kebijakan Moneter Islam</b>	
A. Analisis Teori dan Praktik Moneter Islam di Indonesia.....	56
B. Pengembangan Moneter Islam.....	56
<b>BAB XI Standar Moneter Internasional</b>	
A. Standar Moneter Intenasional .....	58
B. Macam-macam Standar Moneter .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## **BAB 1**

### **SELAYANG PANDANG EKONOMI DAN UANG**

#### **POSISI EKONOMI MONETER DALAM ILMU EKONOMI**

Sebagai salah satu cabang ilmu, ekonomi moneter sangat berkaitan dengan ilmu sosial lainnya. Fenomena ekonomi yang terjadi akan terkait dengan bidang ekonomi yang lainnya. Sebagaimana yang diketahui, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya. Posisi kegiatan ekonomi akan sangat berkaitan dengan kegiatan dibidang moneter. Aspek moneter dalam kegiatan ekonomi meliputi penawaran dan permintaan uang, perilaku tingkat bunga, dan kebijakan moneter dalam perekonomian. Keberadaan ekonomi moneter dalam ilmu ekonomi juga akan mencakup bidang ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, ekonomi public, dan ekonomi internasional.

#### **EKONOMI MONETER DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO**

Perekonomian suatu negara membutuhkan serangkaian kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomiannya. Stabilitas tersebut tercermin pada terkendalinya harga barang dan jasa, adanya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran, serta adanya kegiatan ekonomi yang semakin meningkat yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi. Berjalannya system perekonomian yang terkoordinasi dengan baik melalui kebijakan ekonomi yang sinergis merupakan landasan yang kuat dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Terbangunnya system perekonomian yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi yang kondusif sangat membantu dalam pemanfaatan factor produksi suatu negara. Namun, terdapat fakta bahwa dinamika yang terjadi dalam berkembangnya perekonomian juga tidak bisa lepas dari situasi ekonomi moneter yang terjadi. Sebagai sisi lain dalam perkembangan perekonomian, ekonomi moneter memiliki peran penting dalam menjelaskan dinamika yang terjadi pada sector keuangan dan perbankan. Ekonomi moneter dan stabilitas ekonomi makro merupakan system yang dapat menggambarkan bagaimana perekonomian dapat menjalankan perannya dalam mencapai tujuan kesejahteraan hidup bagi masyarakat suatu negara.<sup>1</sup>

#### **DEFENISI UANG**

Uang didefinisikan *money any good that people generally accepted in exchange good and service*, uang adalah sesuatu (benda) yang diterima secara umum sebagai alat tukar dalam transaksi barang dan jasa. Alat tukar yang dimaksud berupa benda apa saja yang diterima oleh setiap orang (masyarakat) dalam transaksi barang dan jasa. Dari definisi tersebut ada dua unsur penting yang

---

<sup>1</sup> Imam Mukhlis, *Ekonomi Keuangan dan Perbankan teori dan aplikasi*, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2015), h. 8-9

perlu diperhayikan, yaitu sesuatu benda dan diterima secara umum. Dengan begitu dapat dipahami bahwa uang sangat berguna untuk memperlancar transaksi dalam perekonomian.

Sementara itu, Hubbard menyatakan “*money is anything that people are willing to accept in payment for goods and services or to pay off debts.*” Definisi uang tersebut diatas dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, hukum dan politik. Jika ditinjau dari aspek/pengertian ekonomi maka uang merupakan barang ekonomi dan langka. Jika definisi uang di lihat dari sudut pandang ilmu hukum, maka uang adalah alat pembayaran yang sah. Jika definisi uang ditinjau dari aspek politik, maka uang merupakan sesuatu yang diterima secara politik atau menunjukkan adanya penerimaan secara politik. Mata uang yang diakui oleh masyarakat dunia menunjukkan bahwa mata uang negara tersebut diterima secara ekonomi, hukum dan politik yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh.

Menurut Manurung dan Rahardjasa, bahwa sebelum manusia menciptakan uang dari logam (emas dan perak), alat tukar (uang) yang digunakan terbuat dari kerang.<sup>2</sup>

## KRITERIA UANG

Benda yang disepakati untuk menjadi ‘uang’ harus memiliki karakteristik yang khas, sehingga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong transaksi perdagangan yaitu benda itu harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Disukai dan diterima oleh umum (*acceptability and cognizability*), sebab sebagai alat transaksi yang melibatkan kepentingan masyarakat luas, maka harus ada kesepakatan bahwa uang tersebut dapat digunakan untuk alat transaksi secara umum.
2. Nilainya stabil (*stable in value*), stabilitas dalam nilai merupakan persyaratan penting dari uang. Karena uang menjadi indikator utama kegiatan ekonomi secara makro dan mikro. Stabilitas dalam nilai uang akan memudahkan pelaku ekonomi melakukan perencanaan dan perkiraan dimasa yang akan datang. Uang sebagai alat untuk mengukur dan menilai barang yang ditransaksikan harus memenuhi nilai yang stabil, sehingga dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu barang dibandingkan barang lainnya.
3. Mudah disimpan dan tahan lama (*portable*), agar uang tersebut dapat digunakan untuk kegiatan transaksi, maka uang tersebut dapat mendorong aktivitas ekonomi kapan saja
4. Mudah dibawa-bawa (*portable*), maksudnya bahwa uang tersebut dapat digunakan kapan saja dan dimana saja untuk melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang.
5. Mudah bagi-bagi dalam satuan-satuan yang lebih kecil (*divisible into small unit*), uang harus bisa digunakan untuk melancarkan transaksi transaksi

---

<sup>2</sup> M. Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2014), h. 2-10.

baik dalam skala dan ukuran yang besar maupun yang kecil, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui transaksi ekonomi dimasyarakat dapat di penuhi melalui transaksi ekonomi dimasyarakat.

Mencukupi kebutuhan dunia usaha (*elasticity of supply*), jumlah dan nilai uang harus dapat mendukung kegiatan ekonomi yang terus berkembang, sehingga keberadaannya harus ada kapan saja dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jumlah dan nilai uang harus mampu memenuhi kebutuhan perdagangan yang terus berkembang baik volume maupun jenisnya.

## FUNGSI DAN PERAN UANG

Fungsi uang dalam perekonomian meliputi sebagai berikut.

1. Alat tukar perdagangan (*medium of exchange*) yaitu dengan adanya uang sebagai alat untuk melakukan transaksi, maka pelaku ekonomi tidak perlu harus menukar barang secara barter yang sangat merepotkan, tetapi cukup barangnya yang dijual dengan sejumlah uang tertentu dan kemudian dibelikan dengan barang yang diinginkannya. Dengan adanya uang transaksi perdagangan akan berjalan lebih mudah efisien. Setiap pelaku ekonomi bebas menentukan pilihan barang dan jasa yang diinginkannya sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki.
2. Satuan hitung (*unit of account*) yaitu dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dinyatakan dengan harga (*price*) yang mencerminkan nilai barang yang dapat diperbandingkan dengan barang lainnya. Dengan adanya uang juga memudahkan dalam pengambilan keputusan ekonomi karena dapat menentukan berapa harga (*price*) suatu produk (*cost*) dan besarnya pendapat (*income*).
3. Alat penyimpanan nilai (*store of value*) yaitu dengan menggunakan uang. Maka aktivitas ekonomi seperti pengeluaran untuk konsumsi dan pembayaran pinjaman dapat disimpan dan digunakan pada waktu yang akan datang. Uang juga dapat disimpan dan digunakan pada masa yang akan datang karena sifatnya yang liquid yaitu dapat dengan mudah ditukar dengan barang yang diinginkan.
4. Standar pembayaran yang ditangguhkan (*standar of deferred payments*) yaitu dengan uang maka pemberian pinjaman dan pelunasan dapat dilakukan pada waktu yang tidak sama, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi yang tidak dapat dilakukan secara tunai.

Uang memegang peranan yang penting dalam perekonomian sistem dan motif memegang uang yaitu sebagai berikut

1. Motif transaksi (*transcation motive*) yaitu kebutuhan uang untuk meningkatkan transaksi yang ditunjukkan oleh besarnya pendapatan nasional maka semakin tinggi tingkat transaksi yang ditunjukkan oleh besarnya pendapatan nasional maka semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan uang. Pada masyarakat yang tingkat kebutuhan akan uang. Dalam dunia bisnis kebutuhan uang kas untuk mendukung kebutuhan pembelian bahan-bahan baku. Sehingga kegiatan produksi bisa berjalan. Sedangkan



bagi masyarakat konsumen kebutuhan pokok uang kas yaitu untuk keperluan belanja barang kebutuhan pokok dan penunjang pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, informasi dan sebagainya.

2. Motif berjaga-jaga (*precautionary motive*) yaitu mengantisipasi keadaan masa depan yang penuh ketidak pastian (*uncertainty*), maka perlumempersiapkan dengan sejumlah uang untuk berjaga-jaga seandainya menghadapi masalah seperti ada yang sakit meninggal dan kecelakaan yang berakibat kerusakan pada mesin produksi, peralatan, dan sebagainya. kebutuhan uang juga perlu untuk mengantisipasi seandainya ada peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan atau mengembangkan jaringan usaha sehingga kegiatan usaha dapat terus berkembang.

Intensitas fungsi dan peranan uang dalam perekonomian terkait dengan kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah melalui otoritas moneter yaitu bank sentral. Fungsi dan peranan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar melalui instrument kebijakan moneter akan berpengaruh terhadap indikator ekonomi moneter seperti tingkat bunga, inflasi, dan nilai tertukar.

Uang juga berdampak pada peningkatan efisiensi perekonomian melalui kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan adanya uang maka kegiatan ekonomi dalam bentuk konsumsi, produksi dan distribusi dapat berjalan lebih efisien serta potensi ekonomi dan sumber daya ekonomi dapat termanfaatkan dengan baik. Bisa diibaratkan uang seperti pelumas yang dapat memperlancarkan arus dan pergerakan mesin ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa jadi lebih sejahtera.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Imamudin Yuliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 201-204.

## BAB II PERMINTAAN UANG

### TEORI PERMINTAAN UANG KLASIK

Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang. Teori permintaan uang ini dikembangkan oleh Irving Fischer yang kemudian dikenal dengan *Quantity Theory of Money* (QTM). Teori ini dikembangkan oleh ekonomi klasik pada abad ke-19 dan abad ke-20. Teori QTM adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana nilai nominal dari pendapatan agregat ditentukan. Selain itu, teori ini juga menjelaskan seberapa besar uang dibutuhkan untuk sejumlah pendapatan agregat tertentu. Salah satu ciri penting dalam teori ini adalah bagaimana tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap permintaan uang. Dengan sederhana Irving Fischer merumuskan teori kuantitas uang sebagai berikut :

$$MV = PT$$

Dimana :

- M : Jumlah Uang Beredar
- V : Jumlah waktu yang dibutuhkan uang untuk dibelanjakan
- P : Harga Barang
- T : Volume Barang yang diperdagangkan

Dalam hal ini, terdapat tiga asumsi teoritis dalam teori kuantitas uang, *Pertama*, V dianggap tetap terhadap penawaran uang, *Kedua*, Jumlah uang beredar merupakan variabel eksogen, *Ketiga*, Arah hubungan timbal balik dari sisi kiri ke sisi kanan persamaan.

Implikasi dari teori moneter dari Fischer adalah sebagai berikut :

1. Permintaan akan uang didalam suatu masyarakat merupakan suatu proporsi tertentu dari volume transaksi, dan volume transaksi merupakan suatu proporsi konstan dari tingkat output masyarakat. Jadi permintaan uang pada analisa akhir ditentukan oleh tingkat pendapatan nasional saja, dan tidak dipengaruhi oleh factor-faktor lain seperti tingkat bunga.
2. Dari segi kebijaksanaan ekonomi makro, teori moneter ini mempunyai implikasi yang penting, yaitu bahwa tingkat pendapatan nasional equilibrium, atau tingkat harga umum bila tingkat full employment sudah tercapai, tidak bisa dipengaruhi oleh kebijaksanaan fiscal.<sup>4</sup>

### TEORI PERMINTAAN UANG KEYNES

Teori permintaan uang focus pada pembentukan model yang menjelaskan bagaimana permintaan uang terbentuk. Salah satu ekonom penting dalam kaitannya dengan teori permintaan uang tersebut adalah John Maynard Keynes. Pada tahun 1936, dalam tulisannya yang berjudul *The General Theory of*

---

<sup>4</sup> Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu EKonomi No. 5 Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1998), h. 20

*Employment, Interest, and Money*. Keynes secara tegas menolak pandangan klasik tentang perputaran uang yang bersifat konstan. Keynes kemudian mengembangkan teori permintaan uang yang lebih menekankan pada pentingnya suku bunga. Keynes, dalam teorinya tentang permintaan akan uang, membedakan antara motif transaksi (berjaga-jaga) serta spekulasi.

1. Permintaan Uang Motif Transaksi (Berjaga-jaga)

Keynes menyatakan, bahwa permintaan uang untuk tujuan transaksi ini tergantung dari pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan, makin besar keinginan akan uang untuk transaksi. Masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi, biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibanding masyarakat yang pendapatannya lebih rendah. Penduduk yang tinggal dikota besar cenderung melakukan transaksi yang lebih besar dari penduduk yang tinggal dikota kecil (pedesaan).

2. Permintaan Uang Motif Spekulasi

Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini, menurut Keynes ditentukan oleh tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin rendah keinginan masyarakat akan uang untuk tujuan spekulasi. Alasannya, *Pertama*, apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos memegang uang makin besar, sehingga keinginan masyarakat akan uang makin kecil dan sebaliknya. *Kedua*, Hipotesa Keynes bahwa masyarakat menganggap akan adanya tingkat bunga normal berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman tingkat bunga yang baru terjadi.

Pada garis besarnya teori Keynes membatasi pada keadaan dimana pemilik kekayaan bisa memilih memegang kekayaannya dalam bentuk uang tunai atau obligasi. Uang tunai dianggap tidak memberikan penghasilan, sedang obligasi dianggap memberikan penghasilan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode. Sekarang, orang bisa “berspekulasi” mengenai perubahan tingkat bunga diwaktu mendatang.

## TEORI PERMINTAAN UANG MODERN

Milton Friedman mengembangkan teori permintaan uang berkat karyanya dalam artikel yang berjudul *The Quantity Theory of Money: A Restatement* pada tahun 1956. Menurut Friedman, permintaan uang dipengaruhi oleh factor-faktor yang sama yang mempengaruhi permintaan asset. Oleh karena itu, Friedman kemudian mengembangkan *The Theory of Asset Demand to Money*. Teori Friedman tersebut mengindikasikan bahwa permintaan uang merupakan fungsi dari sumber daya yang dimiliki oleh individu dan imbal hasil yang diharapkan dari asset lain. Friedman memberikan definisi kekayaan meliputi segala sesuatu yang dapat merupakan sumber pendapatan. Salah satu sumber pendapatan ini adalah dari manusia itu sendiri, sehingga diri manusia (Kepandaian, contohnya) merupakan salah satu bentuk kekayaan, disamping bentuk yang lain seperti surat berharga, tanah, perhiasan, dll. Dari sudut pandang ini maka tingkat bunga menunjukkan suatu hubungan antara jumlah kekayaan dengan aliran pendapatan. Secara formula hubungan ini dapat ditunjukkan sebagai berikut :

$$W = Y/r$$

Dimana :

- W : Kekayaan
- Y : Aliran Pendapatan
- r : Tingkat Bunga

Seorang pemilik kekayaan akan selalu berusaha untuk memilih bentuk-bentuk kekayaan sehingga mencapai kepuasan yang maksimum. Hal ini dapat dicapai apabila tingkat substitusi antara satu bentuk kekayaan dengan bentuk kekayaan yang lain sama dengan tingkat substitusi yang dia inginkan. Friedman membagi bentuk kekayaan dalam lima kategori, yakni : uang tunai, obligasi, saham, kekayaan berbentuk fisik seperti tanah, kekayaan manusiawi (human capital).

Factor-faktor selain pendapatan, harga/tingkat bunga, dan selera yang mempengaruhi permintaan uang, sebagai berikut :

1. Kekayaan dari masyarakat  
Masyarakat yang makin kaya diharapkan makin besar pula permintaan akan uang. Namun demikian dengan makin banyaknya alternatif bentuk kekayaan yang dapat ditukarkan dengan uang tunai, maka kenaikan kekayaan tidak selalu tercermin pada kenaikan permintaan uang tunai, mungkin sebagian diwujudkan dalam bentuk kekayaan lain seperti tabungan atau surat berharga jangka pendek.
2. Tersedianya Fasilitas Kredit  
Dengan makin banyaknya serta mudahnya fasilitas kredit seperti credit card, maka permintaan akan uang tunai akan semakin kecil.
3. Kepastian tentang pendapatan yang diharapkan  
Apabila masyarakat lebih pasti tentang pendapatan yang diharapkan dimasa mendatang, maka permintaan uang cenderung turun dan sebaliknya.
4. Harapan tentang Harga  
Apabila masyarakat mengharap bahwa dikemudian hari harga barang dan jasa akan turun, mereka cenderung menahan uang tunai dengan menunda pembelian barang, dan sebaliknya.
5. Tersedianya beberapa alternative bentuk kekayaan  
Permintaan uang akan semakin besar apabila didalam masyarakat hanya tersedia sedikit variasi jumlah bentuk kekayaan, dan sebaliknya.
6. Sistem/cara pembayaran yang berlaku  
Apabila proses produksi mulai dari bahan mentah, sampai barang jadi demikian juga distribusinya dilakukan oleh beberapa perusahaan yang berbeda serta pembayarannya dilakukan dengan uang tunai, maka permintaan uang tunai akan semakin besar, dan sebaliknya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*, ( Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2000), h. 143-150

## **BAB III**

### **PENAWARAN UANG**

#### **PENAWARAN UANG**

Penawaran uang yang diterjemahkan dari istilah inggrisnya, yaitu *money supply* dalam bahasa Indonesia lebih sering dinyatakan sebagai uang beredar. Dalam penawaran uang harus dibedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Sentral dan Mata uang tersebut terdiri atas uang kertas dan uang logam. demikian, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Adapun uang beredar, yaitu semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian (mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral pada bank-bank umum).

Jadi, penawaran uang (*money supply*) merupakan jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Konsep penawaran uang atau uang beredar mempunyai arti yang kompleks. Dan konsep itu dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu uang beredar dalam arti sempit/ *Narrow Money*(M1), uang beredar dalam arti luas /*Broad money*(M2), uang beredar lebih luas lagi (M3).

1. Uang beredar dalam arti sempit /*Narrow money* (M1).  
Meliputi uang kartal ( uang kertas dan uang logam) yang ada dalam peredaran ditanda dengan uang giral (uang bank), yaitu deposito yang disimpan dalam bank-bank umum yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek, giro atau surat perintah lainnya.
2. Uang beredar dalam arti luas / *Broad money* (M2).  
Meliputi M1 ditambah dengan tabungan dan deposito berjangka di bank-bank umum. Tabungan dan deposito berjangka itu dinamakan juga sebagai **uang kuasi**. Uang kuasi ini adalah uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayaran karena keterikatan waktu.
3. Uang beredar lebih luas lagi (M3).  
Meliputi M2 dan ditambah lagi dengan deposito dan tabungan berjangka dalam lembaga-lembaga keuangan yang lain diluar dari bank-bank umum.

#### **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENAWARAN UANG**

1. Tinggi-rendahnya tingkat bunga  
Makin tinggi tingkat bunga bank makin sedikit jumlah uang yang beredar, semakin rendah tingkat bunga semakin banyak jumlah uang yang beredar.
2. Tingkat pendapatan masyarakat  
Semakin tinggi pendapatan masyarakat semakin banyak uang beredar sebab masyarakat semakin sering melakukan transaksi.

3. Jumlah penduduk  
Semakin banyak jumlah penduduk semakin banyak dan semakin cepat uang beredar.
4. Keadaan letak geografis  
Uang lebih cepat dan lebih banyak beredar di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.
5. Struktur ekonomi masyarakat  
Negara berstruktur ekonomi industri, peredaran uangnya lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan negara yang struktur ekonominya agraris.
6. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)  
Penduduk Negara yang menerapkan teknologi tinggi biasanya peredaran uangnya lebih cepat dibandingkan dengan Negara yang tidak menerapkan teknologi tinggi.
7. Globalisasi industri di lingkungan dunia usaha  
Semakin global dan arus modal ekonomi antarnegara yang semakin meningkat, uang yang beredar juga dipengaruhi oleh transaksi-transaksi internasional dalam hal ini kurs uang mempengaruhi peredaran.
8. Harga barang  
Merupakan faktor yang bersifat sensitif terhadap jumlah uang yang beredar, yaitu jika harga suatu barang mahal, maka masyarakat dituntut untuk memiliki jumlah uang lebih banyak sehingga akan menyebabkan jumlah uang beredar semakin banyak. Demikian sebaliknya, jika harga barang itu murah maka jumlah uang beredar akan berkurang. Karena masyarakat akan lebih banyak menyimpan uang di bank.
9. Selera masyarakat terhadap barang  
Apabila selera masyarakat meningkat terhadap suatu barang, maka akan mendorong naiknya permintaan. Jadi apabila permintaan naik maka harga barang juga naik sehingga jumlah uang beredar akan naik.<sup>6</sup>

#### FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERGESERAN KURVA PENAWARAN UANG

1. Tingkat Bunga  
Merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga terlalu tinggi, dunia usaha akan lesu

---

<sup>6</sup>Masyhuri machfudz, *Dekonstruksi model ekonomi islam*, (Malang: MALIKI PRESS, 2015) h.27

2. **Tingkat Inflasi**  
Inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah dan perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa yang ditawarkannya.
3. **Tingkat Produksi dan Pendapatan Nasional**  
Bila tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar. Dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha (melalui peningkatan suku bunga dan peningkatan harga).
4. **Kondisi Kesehatan Dunia Perbankan**  
Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Bank Indonesia menetapkan tingkat sadangan tertentu, yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank.
5. **Nilai Tukar Rupiah**  
Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar, sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran. Tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun terangkat.

## TEORI PENAWARAN UANG TANPA BANK

Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas, ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Dalam sistem moneter seperti itu, uang beredar ditentukan oleh proses pasar. Adapun pemerintah, Bank Sentral, ataupun perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang yang beredar. Semuanya serba otomatis dan sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah atau Otoritas Moneter untuk melakukan campur tangan di pasar uang (yaitu melaksanakan kebijakan moneter). Dalam hal ini, penawaran uang hanya bertambah jika orang memproduksi emas (baru). Jadi, jumlah uang beredar bergantung pada perilaku produsen emas. Produsen emas hanya akan memproduksi apabila menguntungkan. Sekarang, karena emas adalah alat pembayaran yang umum, maka harga emas naik berarti pula bahwa barang-barang turun dan begitu sebaliknya.

Standar uang yang biasa digunakan ada dua macam, antara lain:

1. **Standar Kertas** adalah sistem keuangan yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah dan tidak terbatas, tetapi tidak dapat ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi.

2. Standar Logam (Metalisme) dibedakan menjadi dua, yaitu:
  - a. Standar monometalisme, terjadi jika suatu negara menggunakan standar uangnya hanya satu buah logam mulia. Misalnya hanya menggunakan emas atau menggunakan perak.
  - b. Bimetalisme dua logam, standar ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
    - 1) Standar pincang adalah standar uang yang menggunakan emas sebagai standar uang dan perak sebagai alat pembayarannya.
    - 2) Standar paralel adalah standar uang yang menggunakan dua logam mulia berupa emas dan perak secara bersama-sama sebagai standar uangnya. Namun, perbandingan yang berlaku hanya satu macam, yaitu menurut pasar saja.
    - 3) Standar kembar adalah standar uang yang menggunakan dua logam mulia, berupa emas dan perak secara bersama-sama sebagai standar uangnya.

## TEORI PENAWARAN UANG MODERN

Dalam perekonomian modern, para produsen emas tidak lagi memiliki peranan moneter yang penting seperti dalam sistem standar emas. Dalam sistem standar kertas, sumber dari terciptanya uang beredar, yaitu otoritas moneter (Bank Sentral). Otoritas moneter merupakan produsen uang inti atau uang primer. Adapun lembaga keuangan (perbankan) merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder (uang giral) hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Uang sekunder diciptakan oleh bank berdasarkan atas uang primer yang dipegang bank (cadangan bank). Jadi sebenarnya pasar uang itu terdiri dari 2 “sub-pasar”, yaitu sub-pasar uang primer dan sub-pasar uang sekunder. Masing-masing mempunyai permintaan” dan “penawaran”nya, namun kedua sub tersebut sangat erat berhubungan satu sama lain. Sub-pasar uang primer bersifat lebih fundamental karena uang sekunder (giral) hanya bisa tumbuh karena ada uang primer.

Proses terciptanya uang beredar adalah merupakan “proses pasar” artinya hasil interaksi antara permintaan dan penawaran, dan bukan sekedar pencetakan uang atau suatu keputusan Pemerintah belaka. Apabila misalnya pada suatu waktu permintaan akan uang inti maupun sekunder tidak “klop” dengan penawaran uang inti dan sekunder, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan “penyesuaian” berupa tindakan-tindakan di kedua sub-pasar uang sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Karena ke dua sub-pasar tersebut sangat erat terkait satu sama lain, maka para pelaku tersebut baru berhenti melakukan tindakan-tindakan penyesuaian hanya apabila permintaan dan penawaran di masing-masing sub-pasar mencapai keseimbangan secara bersama-sama (simultan).

Keseimbangan sesungguhnya atau equilibrium terjadi apabila keseimbangan di kedua sub pasar tersebut. Apabila sub pasar inti sudah mengalami keseimbangan, akan tetapi sub pasar sekunder belum mencapai keseimbangan maka akan terjadi proses penyesuaian oleh para pelaku pasar sekunder dan otomatis membuat sub pasar inti juga tidak terdapat pada titik yang



seimbang. Penyesuaian menuju equilibrium harus dilakukan bersama antara sub pasar inti maupun sekunder. Hal ini mengingat karena kedua sub pasar tersebut erat kaitannya.

Tindakan-tindakan penyesuaian tersebut tidak lain berupa usaha dari para pelaku tersebut untuk mengubah struktur atau komposisi dari kekayaan yang ia pegang menuju ke arah struktur dan komposisi yang ia inginkan. Dalam teori moneter kita mempunyai istilah khusus bagi proses penyesuaian komposisi neraca ; kita menamakannya proses penyesuaian portofolio atau portfolio adjustment. Teori moneter menyatakan bahwa posisi equilibrium ini akhirnya akan tercapai juga setelah terjadi banyak kali “putaran” penyesuaian portofolio. Melalui proses penyesuaian portofolio tersebut sebenarnya telah terjadi semacam “pelipatan” uang beredar, atau terjadi proses multiplier. Proses inilah yang merupakan inti dari teori mengenai penawaran uang.<sup>7</sup>

## KEBIJAKAN BANK SENTRAL DALAM MENGATUR PENAWARAN UANG

Salah satu fungsi dari bank sentral adalah untuk mengawasi penawaran uang. Kebijakannya perlu berusaha agar, tersedianya uang yang cukup untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh, dan jumlahnya tidak perlu berlebihan sehingga dapat menghindari masalah inflasi yang merugikan masyarakat dan menimbulkan efek yang buruk ke atas pertumbuhan ekonomi.

1. Operasi pasar terbuka (*open market operation*).

Jika bank sentral menginginkan jumlah uang beredar berkurang maka bank sentral dapat menjual surat berharga pasar uang (SBPU), sebaliknya jika bank sentral menginginkan jumlah uang beredar bertambah maka bank sentral membeli SBPU.

2. Cadangan minimum (*reserve requirement*).

Untuk menjaga kestabilan bank kepercayaan nasabah-nasabahnya, bank sentral membuat berbagai peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank-bank umum. salah satu peraturan yang penting adalah mewajibkan bank-bank umum untuk menyimpan suatu rasio tertentu diantara dana yang perlu tersedia dengan jumlah deposito yang diterimanya. Dana tersebut dapat berupa uang tunai dalam bank, deposito di banklain dan deposito di bank sentral. Rasio ini dinamakan cadangan minimum yang dimiliki bank umum, jika bank sentral menginginkan jumlah uang beredar berkurang maka bank sentral dapat membuat kebijakan menambah besaran reserve requirement yang dimiliki bank umum. misalnya pemerintah ingin menstimulir kegiatan ekonomi dengan menambah penawaran uang. Salah satu caranya yaitu dengan menurunkan cadangan wajib minimum, misalnya dari 25 persen menjadi 20 persen, jumlah uang giral yang dapat diciptakan oleh bank adalah (1/0,2) Rp. 2 triliun = Rp. 10 triliun. Jadi apabila bank sentral ingin menurunkan jumlah penawaran uang, persentasi

---

<sup>7</sup>Jeff Madura, *Pengantar Bisnis edisi 4*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), h. 147.

cadangan wajib perlu dinaikan, dan sebaliknya apabila bank sentral ingin menambah jumlah penawaran uang maka persentasi cadangan wajib perlu diturunkan.

3. Discount rate

Jika bank sentral menginginkan jumlah uang beredar ditambah maka bank sentral dapat membuat kebijakan mengurangi tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI), sebaliknya jika ingin mengurangi jumlah uang beredar dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI).

4. Moral situation

Merupakan kebijakan bersifat sugesti yang dilakukan bank sentral pada bank umum untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga guna menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Contoh nya seperti menghimbau perbankan pemberian kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih kebank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Aulia pohan, *Potret kebijakan moneter Indonesia*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO, 2008) h.31-34

## **BAB IV TINGKAT BUNGA**

### **PENGERTIAN SUKU BUNGA**

Suku bunga adalah harga yang dibayar “peminjam” (debitur) kepada “pihak yang meminjamkan” (kreditur) untuk pemakaian sumber daya secara interval waktu tertentu. Jumlah pinjaman yang diberikan disebut *principal*, dan harga yang dibayar biasanya diekspresikan sebagai presentase dari *principal* per unit waktu (umumnya, setahun).

Suku bunga yang menyediakan jangkar bagi suku bunga- suku bunga yang lain, yaitu suku bunga riil jangka pendek yang bebas risiko. Yang dimaksud dengan *suku bunga riil* adalah suku bunga yang akan berlaku dalam perekonomian jika harga rata- rata barang dan jasa diperkirakan tetap konstan selama usia pinjaman. Yang dimaksud dengan *suku bunga bebas risiko* adalah suku bunga pinjaman dimana peminjamnya tidak akan gagal memenuhi kewajiban apapun. Yang dimaksud *jangka pendek* adalah suku bunga dari pinjaman yang akan jatuh tempo dalam setahun. Semua suku bunga yang lain berbeda dengan suku bunga yang ini sesuai aspek- aspek tertentu dari pinjaman, seperti jangka waktu jatuh tempo atau *default risk-nya*, atau karena adanya inflasi.<sup>9</sup>

### **FUNGSI SUKU BUNGA**

Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah adalah :

- a) Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
- b) Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain.
- c) Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.

### **TEORI SUKU BUNGA**

#### **1. Teori Suku Bunga Klasik**

Kaum di era klasik mengungkapkan bahwa suku bunga itu menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian yang menyebabkan tabungan yang tercipta pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama yang dilakukan oleh pengusaha. Terlepas dari teori ekonomi

---

<sup>9</sup> Paul A Samuelson dan William D. Nordhaus., *Ekonomi Jilid Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 1986)h.332

mikro, teori klasik menjelaskan bahwa tingkat bunga merupakan nilai balas jasa dari modal. Dalam teori klasik, stok barang modal dicampuradukkan dengan uang dan keduanya dianggap mempunyai hubungan substitusif. Semakin langka modal, semakin tinggi suku bunga. Sebaliknya, semakin banyak modal semakin rendah tingkat suku bunga.

Investasi juga merupakan fungsi dari suku bunga. Makin tinggi suku bunga, keinginan masyarakat untuk melakukan investasi juga semakin kecil. Alasannya, seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari suku bunga yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut merupakan ongkos untuk penggunaan dana (*Cost of Capital*). Makin rendah suku bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil.

Keseimbangan tingkat bunga berada pada titik  $i_0$  dimana jumlah tabungan sama dengan jumlah investasi. Apabila tingkat bunga berada di atas  $i_0$ , berarti jumlah tabungan melebihi keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Para pemilik dana akan bersaing untuk meminjamkan dananya dan persaingan ini akan menekan tingkat bunga turun kembali ke posisi  $i_0$ . sebaliknya, bila tingkat bunga rendah berada di bawah  $i_0$ , maka para pengusaha akan bersaing untuk mendapatkan dana yang relatif lebih besar jumlahnya. Persaingan ini akan mendorong tingkat bunga naik lagi ke  $i_0$ , misalnya terjadi kenaikan efisiensi produksi, maka akan mengakibatkan keuntungan yang diharapkan meningkat sehingga pada tingkat bunga yang sama para pengusaha bersedia membayar dana yang lebih besar untuk membiayai investasi, atau untuk dana investasi yang sama jumlahnya, para pengusaha bersedia membayar tingkat bunga yang lebih tinggi. Keadaan ini ditunjukkan dengan bergesernya kurva permintaan investasi ke kanan atas, sehingga keseimbangan tingkat bunga yang baru adalah pada titik  $i$ .<sup>10</sup>

## 2. Teori Suku Bunga Keynes

Pandangan berbeda diberikan oleh Keynes. Menurutnya, tingkat bunga itu merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi (GNP), sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan memengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dengan demikian akan mempengaruhi GNP. Keynes mengasumsikan bahwa perekonomian belum mencapai full employment. Oleh karena itu, produksi masih dapat ditingkatkan tanpa mengubah tingkat upah maupun tingkat harga. Dengan menurunkan tingkat bunga, investasi dapat dirangsang untuk meningkatkan produk nasional. Dengan demikian setidaknya untuk jangka pendek, kebijaksanaan moneter dalam teori keynes berperan untuk meningkatkan produk nasional.

Pertama, Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan bahwa ada suatu tingkat bunga yang normal. Jika memegang surat berharga pada

---

<sup>10</sup> Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani dan Michael G. Febri, *Pasar dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999) h. 205

waktu tingkat bunga naik (harga turun) mereka akan menderita kerugian. Mereka akan menghindari kerugian ini dengan cara mengurangi surat berharga yang dipegangnya dan dengan sendirinya menambah uang yang dipegang.

Kedua, sehubungan dengan biaya memegang uang kas. Makin tinggi tingkat bunga, makin besar pula biaya memegang uang kas, sehingga keinginan memegang uang kas juga semakin rendah sehingga permintaan akan uang kas naik. Dari kedua penjelasan diatas, dijelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat bunga dengan permintaan akan uang tunai. Permintaan uang ini akan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga berada dalam keseimbangan apabila jumlah uang kas yang diminta sama dengan penawarannya.

### 3. Teori Suku Bunga Hicks

Hicks mengemukakan teorinya bahwa tingkat bunga berada dalam keseimbangan pada suatu perekonomian bila tingkat bunga ini memenuhi keseimbangan sektor moneter dan sektor riil. Pandangan ini merupakan gabungan dari pendapat klasik dan keynesian, dimana madzhab klasik mengatakan bahwa bunga timbul karena uang adalah produktif artinya bahwa bila seseorang memiliki dana maka mereka dapat menambah alat produksinya agar keuntungan yang diperoleh meningkat. Jadi uang dapat meningkatkan produktivitas sehingga orang ingin membayar bunga. Sedangkan menurut keynesian bahwa uang bisa produktif dengan metode spekulasi di pasar uang dengan kemungkinan memperoleh keuntungan, dan keuntungan inilah sehingga orang ingin membayar bunga.<sup>11</sup>

### TINGKAT BUNGA NOMINAL

Tingkat bunga nominal adalah penjumlahan dari unsur-unsur tingkat bunga, yaitu tingkat bunga murni, premi resiko, biaya transaksi, dan premi untuk inflasi yang diharapkan.

### TINGKAT BUNGA RIIL

Dalam kepustakaan teori moneter tingkat bunga nominal sering dilawan dengan apa yang disebut “tingkat bunga riil”. Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga nominal *minus* laju inflasi yang terjadi selama periode yang sama.

### TEORI PARITAS TINGKAT BUNGA

Teori paritas tingkat bunga adalah salah satu teori yang penting mengenai penentuan tingkat bunga dalam system devisa bebas (yaitu, apabila penduduk masing-masing Negara bebas memperjualbelikan devisa). Teori ini pada pokoknya menyatakan bahwa : Dalam system devisa bebas tingkat bunga di Negara satu akan cenderung sama dengan tingkat bunga di Negara lain, setelah diperhitungkan perkiraan mengenai laju depresiasi mata uang Negara satu dengan Negara yang lain.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 207

## FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUKU BUNGA

Faktor –faktor yang memengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga (pinjaman dan simpanan) adalah sebagai berikut.

- a. **Kebutuhan dana**  
Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkat kan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan meningkat pula bunga pinjaman.
- b. **Persaingan**  
Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 16%. Namun sebliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawa bunga pesaing.
- c. **Kebijakan pemerintah**  
Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- d. **Harga laba yang di inginkan**  
Sesuai dengan target yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga ikut besar dan sebaliknya.
- e. **Jangka waktu**  
Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besar kemungkinan resiko dimasa akan datang.<sup>12</sup>
- f. **Kualitas jaminan**  
Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.
- g. **Reputasi perusahaan**  
Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungknan risik macet kredit dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.
- h. **Produk yang kompetitif**  
Produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran.
- i. **Hubungan baik.**  
Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan keaktifan dan loyaritas nasabah yang bersangkutan dengan pihak bank. Nasabah utama biasanya mempunya hubungan yang baik denga pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.
- j. **Jaminan pihak ketiga**  
Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit.biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari

---

<sup>12</sup> Karhi Nishar dan Winard, *Ilmu Ekonomi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997),h. 56

segi kemampuan membayar , nama baik maupun loyarisnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankanpun berbeda.<sup>13</sup>

#### PERAN SUKU BUNGA DALAM PEREKONOMIAN

Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Dengan demikian besarnya investasi dalam suatu jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya adalah lebih besar atau sama dengan tingkat bunga.

Apabila tingkat bunga menjadi lebih rendah, lebih banyak usaha yang mempunyai tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayar para pengusaha, semakin banyak usaha yang dapat dilakukan para pengusaha. Semakin rendah tingkat bunga semakin banyak investasi yang dilakukan para pengusaha.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000).h. 67

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 69

## BAB V PERANAN BANK DALAM PASAR UANG

### PENGERTIAN BANK

Bank berasal dari bahasa Italia yakni “Banco” yang berarti kepingan papan untuk buku sejenis meja. Dan diperluas lagi untuk menunjukkan tempat penukaran uang, untuk memamerkan uang dan difungsikan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta eropa pada abad pertengahan.<sup>15</sup>

Bank diartikan sebagai *lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya*. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah *setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya*.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*.<sup>16</sup>

Bank adalah sebuah lembaga internasional bank intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan wewenang untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan proses atau yang dikenal sebagai bank note. Kata bank berasal dari bahasa Italian banca berarti tempat penukaran uang yang sedangkan menurut undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dari bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Dari definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

---

<sup>15</sup> Moh.Ali Wafa, “*Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah*”, Kordinat, Vol.XVI, No.2, 2017, h.259

<sup>16</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.3-4



2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit* (L/C), dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>17</sup>

## PENGERTIAN PASAR UANG

Pasar uang (moneymarket) di Indonesia masih relative baru jika dibandingkan dengan Negara-negara maju. Namun, dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal (*capital market*).

Bahwa antara pasar uang dan pasar modal terdapat perbedaan yang cukup jelas. Misalnya jika dilihat dari jangka waktunya instrument yang diperjual belikan, tempe penjualannya serta tujuan daripada para penjual dan pembeli dari kedua pasar tersebut.<sup>18</sup>

Perbedaan yang pertama adalah dari instrument yang diperjualbelikan yaitu jika di dalam pasar modal yang di perjualbelikan adalah surat-surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi. sedangkan di dalam pasar uang adalah surat berharga jangka panjang seperti saham atau obligasi. Sedangkan di dalamnya pasar uang adalah surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun seperti, commercial paper, call money, sertifikat bank Indonesia surat berharga pasar uang atau banker's accepted.

Kemudian jika dilihat dari segi pasar tempat diperjual belikan surat-surat berharga tersebut juga berbeda, misalnya dalam jual beli pasar modal para penjual dan pembeli dapat bertemu di suatu tempat tertentu seperti di bursa efek, sedangkan pasar uang pasarnya abstrak artinya penjualan dan pembelian surat-surat tersebut tidak di dalam pasar tertentu, tetapi melalui sarana elektronik seperti telepon mile atau telex. Dengan kata lain, di pasar uang dapat diperoleh antarkreditor dengan investor secara langsung di berbagai tempat. Perbedaan lainnya jika dilihat dari tujuan pada penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-

<sup>17</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 4-5

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 206-

surat berharga tersebut. dalam pasar uang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti untuk keperluan modal kerja, sedangkan di dalam pasar modal lebih ditekankan kepada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Bagi investor dengan membeli surat-surat berharga di pasar uang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan juga untuk penguasaan perusahaan.<sup>19</sup>

Para peserta dalam pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata, hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh karena itu, faktor kepercayaan sangatlah dominan sebelum surat-surat tersebut dibelikan oleh investor di samping faktor-faktor lainnya.<sup>20</sup>

Dalam pasar uang, terhadap dua pihak yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing pula. Adapun pihak-pihak yang terlihat dalam pasar uang adalah sebagai berikut:

- Pihak yang membutuhkan dana; dalam hal ini baik bank maupun perusahaan non bank yang membutuhkan dana segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu.
- Pihak yang menanamkan dana; yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan non bank dengan tujuan investasi di pasar uang.

## PERANAN BANK SEBAGAI PERANTARA UANG

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana.

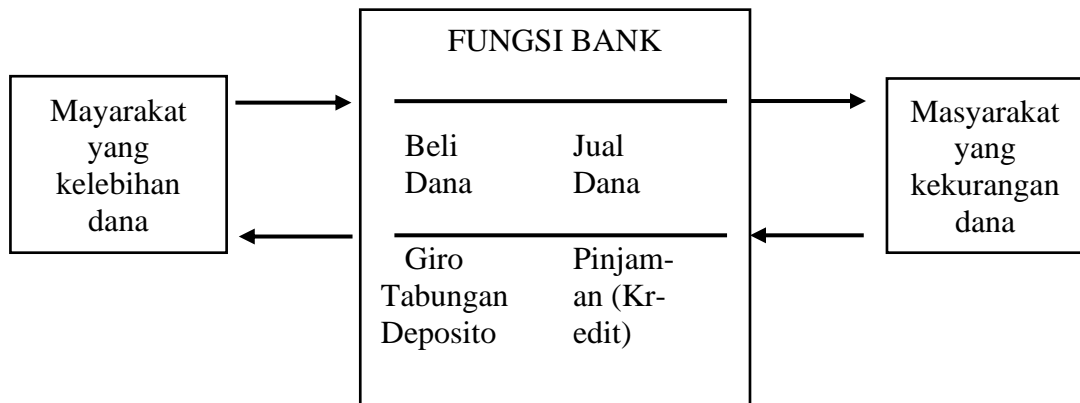
Bank sebagai perantara keuangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 190-191

<sup>20</sup> *Ibid*, h..191

<sup>21</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 6



Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, di mana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan atau Deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana apakah dalam bentuk Giro, Tabungan atau Deposito.
2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
3. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.<sup>22</sup>

Sebagai perantara keuangan bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah *Spread Based*. Jenis keuntungan ini diperoleh dari bank jenis konvensional. Sedangkan bagi bank syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah bagi hasil atau *profit sharing*.<sup>23</sup>

Di samping keuntungan yang diperoleh dari *spread based*, bank juga memperoleh keuntungan dari kegiatan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya yang diberikan oleh bank dipungut biaya yang besarnya tergantung dari jenis jasa bank yang digunakan. Biaya yang dipungut meliputi biaya kirim, biaya

<sup>22</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 6-7

<sup>23</sup> *Ibid*, h.7

tagih, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa, dan biaya lainnya.<sup>24</sup>

## PERANAN BANK SEBAGAI PENCIPTA UANG

Penciptaan uang adalah proses memproduksi atau menghasilkan uang baru. Terdapat tiga cara untuk menciptakan uang:

- a. Dengan cara mencetak mata uang kertas atau uang logam,
- b. Melalui pengadaan utang dan pinjaman,
- c. Melalui beragam kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelonggaran kuantitatif.

Berbagai praktik dan regulasi untuk mengatur produksi, pengeluaran, dan penarikan uang, adalah perhatian utama dalam ilmu ekonomi moneter (misalnya tentang persediaan uang, mazhab monetarisme), dan memengaruhi berjalannya pasar keuangan dan daya beli uang.

Jadi, uang tercipta saat bank memberikan kredit. Kredit adalah uang dan juga adalah hutang, yang harus dibayar kembali plus bunga yang tidak diciptakan saat kredit diberikan. PERUM PERURI atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, juga mencetak produk sekuriti lainnya, termasuk cetakan kertas berharga non uang dan logam non uang.

PERUM PERURI atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, juga mencetak produk sekuriti lainnya, termasuk cetakan kertas berharga non uang dan logam non uang. PERUM PERURI didirikan pada tanggal 15 September 1971, dan merupakan gabungan dari dua Perusahaan yaitu PN. Pertjetakan Kebajoran atau PN.PERKEBA, dan PN. Artha Yasa. Pendirian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 1971, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006.<sup>25</sup>

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 di atas, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) diberikan tugas dan wewenang untuk mencetak lima produk unggulan, yakni uang Republik Indonesia yang meliputi uang kertas dan uang logam, paspor RI, pita cukai, meterai dan sertifikat tanah. Setiap produk yang dicetak oleh Perum Peruri mempunyai ciri khusus yang mengutamakan segi-segi pengamanan, mengingat dokumen tersebut

---

<sup>24</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.7

<sup>25</sup> Sulham Wijaya, *Peranan Bank dalam Pasar Uang*, diakses dari <http://sulhamwijaya.blogspot.com/2014/10/peranan-bank-dalam-pasar-uang.html> , pada Oktober 2014 pukul 18.55

merupakan dokumen negara yang sangat vital. Oleh karena itu, Perum Peruri selalu memfokuskan unsur-unsur sekuriti atau security feature pada setiap produk cetaknya.

Bank sentral bertanggung-jawab mengukur jumlah uang beredar, yang menunjukkan banyaknya uang yang ada pada suatu waktu tertentu. Jumlah uang baru yang tidak diketahui penciptaannya dapat ditunjukkan dengan cara membandingkan pengukuran-pengukuran tersebut pada waktu-waktu yang berbeda.

Perusakan atas mata uang dapat terjadi apabila uang logam dileburkan untuk mendapatkan kembali kandungan logam mulianya. Tindakan ini memperoleh insentif bila ternyata nilai logam yang didapat melebihi nilai nominal uang logam, atau ketika pencetaknya menarik kembali jaminan atas keamanannya.

<sup>26</sup>

## PROSES TRANSAKSI PASAR UANG

Pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun.

### 1. Macam-macam transaksi yang terdapat di Pasar Uang

Untuk mengerahkan dana-dana masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembayaran dan stabilitas moneter, maka perlu diciptakan prasarana-prasarana yang dapat membantu memperlancar mobilisasi dana-dana masyarakat tersebut. Langkah-langkah yang diambil antara lain dengan merintis pasar uang yang teroganisir, yaitu pasar uang antar bank (PUAB). Transaksi PUAB dapat berjangka waktu dari satu hari kerja (overnight) sampai dengan satu tahun tetapi pada prakteknya mayoritas transaksi PUAB berjangka waktu kurang dari tiga bulan. PUAB ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dana-dana bank misalnya:

- a. Bankbank yang sangat memerlukan dana tambahan untuk menutup kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan dan atau untuk memenuhi ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas.
- b. Bank-bank yang mempunyai kelebihan dana dapat menjadikan dana tersebut untuk earning assets dalam rangka mendapat rentabilitas yang optimal dengan cara meminjam hanya untuk waktu yang relatif pendek.<sup>27</sup>

### 2. Pasar Valuta Asing

Pasar valas adalah suatu mekanisme di mana orang mentransfer daya beli antarnegara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs mata uang. Fungsi pasar valas antara lain (MSS FEUI):

---

<sup>26</sup> Sulham Wijaya, *Peranan Bank dalam Pasar Uang*, diakses dari <http://sulhamwijaya.blogspot.com/2014/10/peranan-bank-dalam-pasar-uang.html> , pada Oktober 2014 pukul 18.55

<sup>27</sup> Corvia Maulidya, "Analisis Pasar Uang Antar Bank di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.10, No.1, 2012, h. 58-59

- a. Transfer daya beli (transfer of purchasing power): Sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda.
- b. Penyediaan kredit; Pengiriman barang antarnegara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman barang termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli.
- c. Mengurangi risiko valuta asing: Importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan. Dalam kondisi normal dari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan.<sup>28</sup>

### 3. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka (open market operation) dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar. Sertifikat Bank Indonesia pertama kali diterbitkan pada 1970 dan hanya diperdagangkan antar bank. Namun kebijakan ini tidak berlangsung lama, karena pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk memperkenalkan bank-bank umum untuk menerbitkan sertifikat deposito tahun 1971. SBI diterbitkan kembali dengan keluarnya kebijakan deregulasi perbankan 1 Juni 1983.

Sedangkan pengertian dari Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka.

Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan tanpa warkat dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto. SBI dapat dimiliki oleh bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapat dipindahtangankan. SBI dapat dibeli di pasar perdana dan diperdagangkan di pasar sekunder dengan penjualan bersyarat atau pembelian/penjualan lepas. Selain dipergunakan sebagai piranti kebijakan moneter untuk mempengaruhi likuiditas bank-bank, SBI dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pasar uang.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Akhsanul Haq dan Andir Muniroh, *Analisis Pengelolaan Valuta Asing Terhadap Profitabilitas Pt Garuda Indonesia (Persero) Tbk*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, Vol.1, No.2, 2015, h.80

<sup>29</sup> Nursantri Yanti, "Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah", At-Tawassuth, Vol.3, No.1, 2018, h..588-589

## **BAB VI HAKIKAT RIBA**

### **PENGERTIAN RIBA**

Riba menurut bahasa adalah (*az ziyadah*) artinya bertambah. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai definisi Riba :

**Menurut Ulama Hanafiyah**

“Tambahkan atas benda yang dihutangkan, yang mana benda itu berbeda jenis dan dapat di takar dan ditimbang atau tidak dapat ditakar dan ditimbang tetapi sejenis.”

**Menurut Mazhab Syafi’i**

“Riba adalah perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan.”

**Menurut wahbah al-Zuhaili**

“Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil/bertentangan dengan prinsip syara’.”<sup>30</sup>

Dari berbagai definisi diatas , dapat diambil kesimpulan bahwa riba adalah sebuah kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari pihak penjual terhadap pihak pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua.

Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.

### **DASAR HUKUM RIBA**

Konsep pengharaman riba dalam Alquran tidaklah secara langsung melainkan bertahap, Sama halnya dengan pengharaman khamar dalam Alquran. Hal ini dapat kita lihat dalam Alquran

**Surah ar-Rum Q.S. 30:39**

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah ”... (Ar-Ruum/30: 39).

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Artinya : Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) .

Dalam ayat ini tidak secara tegas Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan riba hanya sebatas perbandingan antara riba dan zakat yang mana riba hanya bersifat kamufase sedangkan zakat bersifat Hakiki.

---

<sup>30</sup> Sri Sudiarti, *fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan:FEBI UIN-SU Press),h. 65

Riba termasuk salah satu topik yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam. Penting bukan saja karena Alquran mengecamnya dengan sangat keras Tetapi lebih dari itu dampak dari Riba sangat menghancurkan sendi-sendi ekonomi bangsa dan umat. Riba sesungguhnya menjadi bagian dari tradisi bangsa Arab yang sudah berurat berakar. tidak mudah untuk menghapusnya. Perlu pendekatan khusus. Demikianlah Alquran dalam menegaskan pengharaman riba tampaknya menempuh jalan (istidraj) atau berangsur-angsur ataupun bertahap.<sup>31</sup>

#### **Surah An-nisa Q.S 4 : 160-161**

فَيُظْلَمُ مَنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya : Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (an-Nisa 160)

وَأَخَذْنَاهُم بِالرَّبِّوَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (an-Nisa 161)

Ayat ini menggambarkan kebiasaan orang-orang Yahudi yang sangat senang memakan riba dan kebiasaan buruk mereka memakan harta dengan cara yang batil. padahal Allah telah mengharamkan hal itu bagi mereka.

#### **Surah Ali Imran Q.S. 3:130**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dalam ayat ini Allah melarang umat Islam makan riba secara berlipat ganda. ayat ini lebih pada penekanan dan bersifat sistematis dibandingkan ayat yang sebelumnya, yakni "makan riba secara berlipat ganda". Maka muncul pertanyaan "Bagaimana jika sedikit?"

#### **Surah Al-Baqarah QS. 2:275-276 Kemudian 278-280**

Ayat ini menegaskan lebih tegas lagi tentang pengharaman riba dan ancaman Allah bagi mereka yang makan riba dan solusi yang baik bagi mereka. Beberapa kandungan pokok dalam ayat diatas adalah:

1. Orang yang memakan riba sama seperti orang yang kesetanan sehingga tidak dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Karena mereka telah menyamakan jual beli dan riba, padahal allah menegaskan bahwa riba itu haram. Sedangkan jual beli itu halal (QS. 2:275).

---

<sup>31</sup> Azhari Akmal Tarigan, "Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi " (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2019) h.189



2. Allah berkehendak memusnahkan riba karena berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya, kemudian diganti dengan shodaqoh yang bermanfaat dan memberdayakan umat. (QS. 2:276).
3. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya dan meninggalkan sisa riba yang belum dipungut titik Dalam hal ini, orang yang pernah mencium kan uang kepada orang lain, hanya berhak mengambil pokok bagian hartanya (yang dipinjamkannya). Apabila melaksanakannya, maka tidak akan ada yang dianiaya maupun menganiaya, Apabila perintah itu tidak dilaksanakan, maka Allah akan memeranginya. (QS. 2:278-279)
4. Alquran mengajarkan agar orang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain mau memberikan tenggang waktu pelunasan ketika Si peminjam mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman pada waktu yang dijanjikan apabila peminjam benar-benar tidak mau mengembalikan maka menyedekahkan kan sebagian atau seluruh pinjaman merupakan sebuah kebaikan di sisi Allah titik pengembalian pinjaman hanya sebesar pokok pinjaman yang diberikan sehingga terhindar dari tindakan menganiaya maupun dianiaya. (QS. 2:280)

## MACAM-MACAM RIBA

Menurut para ulama Fiqih, hasil buah dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

### 1. RIBA DAIN ATAU RIBA DALAM HUTANG PIUTANG

Riba ini disebut juga dengan riba jahiliyah, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada masa zaman Jahiliyah.

### 2. RIBA FADHL

Riba fadhl yaitu memberi tambahan dari salah satu dua barang yang ditukar (dijualbelikan) yang sama jenisnya. Dan ini hukumnya haram.

Contohnya Anda menjual atau meminjamkan biji-bijian atau uang kepada seseorang dengan syarat orang tersebut harus mengembalikannya dengan barang yang sejenis seperti emas dengan emas atau biji dengan biji-bijian dengan disertai tambahan dari barang yang semisal. Dan barang tersebut adalah barang-barang ribawi yang apabila diberi tambahan dari barang semisal akan menjadi riba.

Agar bisa menjauh dari riba fadhl dan tidak terjatuh ke dalamnya serta terhindar darinya, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli barang ribawi, yaitu: Kadarnya harus sama dan Harus serah terima barang di tempat transaksi sebelum berpisah.

Adapun jika barang-barang ribawi yang telah disebutkan dalam hadits berbeda jenisnya, maka tidak masuk dalam riba fadhl. Barang-barang ribawi yang disebutkan dalam hadits ada enam, yaitu: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum[2], sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Inilah harta-harta ribawi

yang rentan terjadi riba di dalamnya dan ini ditetapkan dengan nash dan ijma'. 'Illat (sebab) diharamkannya riba pada emas karena keduanya sama-sama berharga. Adapun illat diharamkannya riba pada kurma, gandum, sya'ir, dan garam karena semuanya dimakan dan ditakar.

### 3. RIBA NASI'AH

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.<sup>32</sup>

## DAMPAK NEGATIF RIBA

### 1. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya utang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan.

### 2. Sosial Kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil dan merugikan orang lain. Pelaku riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan uangnya secara berlebihan, misalnya, 25% lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan : berhasil atau gagal. Apabila gagal pastinya peminjam akan sangat terbebani oleh hutang dan bunga yang ditanggungnya.<sup>33</sup>

## HIKMAH DIHARAMKANNYA RIBA

Islam mengharamkan riba pasti ada sebabnya, adapun pengharaman riba ini karena riba mengandung hal-hal yang sangat negatif bagi perseorangan maupun masyarakat, yakni diantaranya :

1. Melenyapkan faedah hutang-piutang yang menjadi tulang punggung gotong-royong atas kebajikan dan takwa, dalam islam hutang piutang adalah untuk membantu sesama manusia, tetapi dengan hadirnya riba hal ini sis-sia karena pihak yang hutang akan semakin terbebani.

---

<sup>32</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 22-23

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001) h.67

2. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya.
3. Sangat menghalangi kepentingan orang yang menderita dan miskin.
4. Melenyapkan manfaat yang wajib disampaikan kepada orang yang membutuhkan
5. Menjadikan pelakunya malas bekerja keras.
6. Menimbulkan sifat menjajah darikaum hartawan terhadap orang miskin.
7. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN MONETER KONVENSIONAL**

#### **TEORI KEBIJAKAN MONETER**

Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan makro ekonomi, sehingga kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung sasaran ekonomi makro. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai otoritas moneter yang mengatur peredaran uang di masyarakat dan mengatur alokasi uang yang beredar serta mempengaruhi tingkat bunga dalam rangka mencapai sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran yang semakin mantap. Sasaran tersebut sedapat mungkin diusahakan tercapai secara maksimal dan serentak.

Ada beberapa pilihan atau alternatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memantapkan kebijakana moneter dalam rangka mencapai sasaran tersebut, di antaranya sebagai berikut.

1. Memilih tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengabaikan tingkat inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran.
2. Memilih tingkat inflasi yang rendah dan keseimbangan neraca pembayaran dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.
3. Menetapkan sasaran yang akan dicapai secara serentak, tetapi tidak satupun sasaran dapat dicapai secara maksimal. Untuk lebih memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, berikut diberikan data yang berhubungan dengan hal tersebut. Kebijakan moneter pada dasarnya dapat pula dibedakan menjadi kebijakan moneter longgar dan kebijakan moneter ketat.
  - a. kebijakan moneter longgar (*easy monetary policy*) pada umumnya ditempuh untuk mengatasi kelesuan ekonomi dalam negeri dengan penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, Namun akan terjadi inflasi dan dapat menekan keseimbangan neraca pembayaran.
  - b. Kebijakan Moneter ketat (*tight monetary policy*) dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dan dapat membantu keseimbangan neraca pembayaran dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar, akan tetapi dapat memperkecil pertumbuhan ekonomi suatu negara.

#### **FUNGSI KEBIJAKAN MONETER**

Dari pengertian diatas adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah (bank sentral) untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Untuk

memengaruhi jumlah uang beredar, pemerintah dapat melakukan kebijakan uang ketat dan kebijakan yang longgar.

- a. *Tight Money policy*, yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara.
  - Meningkatkan suku bunga
  - Menjual surat berharga
  - Menaikan cadangan kas
  - Membatasi pemberian kredit
- b. *Easy Money policy*, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara.
  - Menurunkan tingkat suku bunga
  - Membeli surat surat berharga
  - Menurunkan cadangan kas
  - Memberikan kredit longgar<sup>34</sup>

## TUJUAN KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan Moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (Bank Indonesia) untuk mempengaruhi jumlah yang beredar dan kredit yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.<sup>35</sup>

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

---

<sup>34</sup> Yenni Samri Juliati Nasution. pengantar ilmu ekonomi, (Medan : FEBI Press, 2018). h.

<sup>35</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan+Kebijakan+Moneter.ac.aid>.

## JENIS – JENIS KEBIJAKAN MONETER

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*)  
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*)
- Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary contractive policy*)  
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*)

## MANAJEMEN KEBIJAKAN MONETER

Adanya ketidakteraturan dan hubungan antar variabel dalam perekonomian sering kali membuat kita sulit untuk mengidentifikasi alur suatu kebijakan moneter mencapai tujuannya. Sehingga banyak pihak masih melihat bahwa mekanisme moneter seperti halnya black-box. Dengan demikian, perlu kiranya kita sedikit mengurai dan memahami proses yang terjadi di dalamnya. Pada dasarnya, ada dua paradigma dalam memahami mekanisme transmisi moneter, yakni apa yang disebut dengan paradigma uang pasif dan paradigma uang aktif. Perbedaan antara dua paradigma ini terletak pada penggunaan sasaran operasional yang digunakan dalam mekanisme moneternya.

### a. Uang Pasif

Paradigma uang pasif percaya bahwa kesenjangan output merupakan kausal utama dalam mekanisme transmisi. Dalam paradigma ini suku bunga jangka pendek dan nilai tukar dijadikan sebagai sasaran antara (*intermediate objective*) yang pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan besaran permintaan, kesenjangan output dan espektasi inflasi. Dalam paradigma uang pasif ini uang dinyatakan sebagai *variable endogen* yang mana otoritas moneter tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk mengatur jumlah uang beredar.

Asumsi yang digunakan dalam dalam paradigma *endogenous* konvensional ini adalah

- Jumlah uang beredar adalah dependent terhadap suku bunga, uang adalah variabel endogen
- Instrument moneter yang dijadikan sasaran operasional bank sentral bukanlah jumlah uang beredar melainkan suku bunga.

Sasaran pokok yang ingin dicapai oleh paradigma ini adalah tercapainya target inflasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sasaran suku bunga jangka pendek sebagai instrument moneternya.

#### b. Uang Aktif

Paradigma uang aktif percaya bahwa liquiditas merupakan kausal utama dalam mekanisme transmisi moneter. Dalam paradigma ini suku bunga dianggap sebagai resultante biasa yang terjadi dalam mekanisme transmisi moneter. Penganut dari paradigma ini adalah Milton Friedman. Paradigma uang aktif secara sederhana dapat dijelaskan dengan teori kuantitas  $MV = PT$  merupakan dasar pijakan utama dalam paradigma uang aktif ini. Bahwa perubahan % M + dengan % V sebanding dengan perubahan % P + Dengan % T. dalam paradigma ini diasumsikan bahwa M secara penuh mampu dikendalikan oleh otoritas moneter sedangkan nilai V adalah konstan. Sehingga, jumlah uang yang beredar merupakan sarana yang aktif dijadikan pemerintah sebagai instrument moneter dalam mengendalikan tingkat inflasi.

Paradigma uang aktif dalam teori konvensional menganggap uang sebagai *variable exogen*. Sasaran pokok yang ingin dicapai dari kebijakan dengan paradigma ini adalah terkendalinya tingkat inflasi dengan menggunakan besaran moneter (jumlah uang beredar) sebagai sasaran operasional.

### BEBERAPA MASALAH DALAM KEBIJAKAN MONETER

Masalah pertama menyangkut pilihan mengenai apa yang sebaiknya dijadikan sebagai “sasaran antara” atau (*intermediate target*) bagi kebijakan moneter. Masalah kedua berkaitan dengan pilihan mengenai konsep “uang beredar” yang mana yang paling baik sebagai sasaran. Masalah ketiga adalah mengenai pilihan apakah kebijaksanaan moneter perlu dilaksanakan secara aktif, atau lebih bersifat “otomatis” dengan mengikuti aturan umum tertentu, dan masalah keempat berkaitan dengan perkembangan baru didalam teori kebijakan moneter dan kebijaksanaan ekonomi makro pada umumnya<sup>36</sup>.

#### a. Tingkat Bunga Atau Uang Beredar

Sasaran akhir jangka pendek dari baik dari kebijaksanaan moneter maupun fiscal adalah menjaga keseimbangan dari perekonomian, yaitu agar tercapai inflasi yang rendah, tingkat kegiatan ekonomi produksi yang tinggi serta neraca pembayaran yang seimbang.

Ini merupakan tujuan yang “ideal” dari kebijaksanaan ekonomi secara keseluruhan. Tentu tidak semua aspek dari sasaran ini akan dicapai secara penuh dan sekaligus dalam kenyataan. Dalam usaha pencapaian sasaran akhir tersebut, kebijaksanaan moneter dengan pengaruhnya pada ketiga aspek sasaran akhir tersebut adalah panjang, sehingga akan sangat terlambat seandainya terjadi kesalahan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan hanya bisa diubah setelah hasil akhir telah diamati.

Tingkat suku bunga yang stabil menunjukkan bahwa situasi pasar uang adalah tenang dan bahwa ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Oleh sebab itu memelihara kestabilan tingkat bunga bukanlah berarti bunga pada tingkat tertentu.

---

<sup>36</sup> Aulia Pohan. *Teori dan implementasi kebijakan Moneter*. Rajawali press. 2019, h. 75

#### b. Bank Indonesia

Memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Kebijakan Moneter, Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.

#### c. Teori Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua Negara di dunia adalah inflasi. Defenisi singkat mengenai inflasi adalah kecendrungan dari harga-harga untuk menaikkan harga secara umum dan terus-menerus (Boediono). Kecendrungan kenaikan harga terjadi karena adanya musiman dan adanya hari-hari besar atau yang terjadi sekali saja.

Kenaikan semacam ini dianggap sebagai masalah atau penyakit ekonomi. Perkataan “kecendrungan” dalam defenisi inflasi perlu digaris bawahi. Kalau seandainya harga-harga dari sebagian besar barang diatur atau ditentukan oleh pemerintah, maka harga yang dicatat oleh biro statistic mungkin tidak menunjukkan kenaikan kenaikan apa pun (karena yang dicatat adalah harga “resmi” pemerintah)<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Boediotomo, dkk. *Ekonomi Moneter*. (Yogyakarta : Pustaka Binaman Prasindo, 2000)



## KERANGKA UMUM KEBIJAKAN MONETER

Kerangka yang umum dipergunakan dalam membahas kebijakan moneter meliputi target, indikator, dan instrumen kebijakan moneter. Target akhir (*ultimate target*) kebijakan moneter adalah variabel-variabel yang ingin dicapai oleh otoritas moneter. Untuk memudahkan, karena dikebanyakan negara otoritas moneter adalah bank sentral, maksud target disini adalah variabel yang ingin dicapai oleh bank sentral. Indikator kebijakan moneter adalah variabel-variabel yang ingin dikontrol oleh bank sentral agar sasaran akhir dapat dicapai. Indikator juga disebut sebagai sasaran menengah atau *intermediate target* dalam usaha mencapai sasaran akhir dari kebijakan moneter. Sementara itu, instrumen kebijakan moneter, sesuai dengan istilahnya, adalah seperangkat variabel yang dimiliki dan sepenuhnya dapat digunakan oleh bank sentral untuk mengontrol indikator sedemikian rupa sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai.

Pertama-tama bank sentral menetapkan target yang ingin dicapai; apakah kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, atau neraca pembayaran yang seimbang. Target tersebut ditetapkan agar sasaran akhir kebijakan ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Berhubung variabel-variabel utama pasar uang, yaitu suku bunga dan jumlah uang beredar mempunyai peranan yang menetapkan apakah target-target tersebut dapat dicapai atau tidak, tahap berikutnya adalah memilih variabel pasar uang yang paling tepat untuk dikontrol agar perkembangannya dapat menunjang tercapainya sasaran.

Variabel-variabel pasar uang tersebut disebut sebagai indikator. Karena indikator sering bergejolak sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada kekuatan-kekuatan yang bergerak dipasar uang, yaitu permintaan dan penawaran uang, indikator yang dipilih harus dapat dikendalikan dengan baik untuk kemudian diarahkan agar perkembangannya menunjang usaha pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pengendalian indikator tersebut dilakukan oleh bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter yang dimiliki, yaitu *reserve requirement*, *open market operation*, dan *discount rate policy*.

## SASARAN AKHIR KEBIJAKAN MONETER

Target kebijakan ekonomi pada umumnya juga merupakan target kebijakan moneter, yaitu stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran merupakan sarana pendukung untuk tercapainya sasaran akhir dari kebijakan ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat.<sup>38</sup> Target akhir tersebut tidaklah selalu sama dari satu negara dengan negara lainnya. Tidak pula harus sama dari waktu ke waktu. Target kebijakan moneter bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan empat hal yang

---

<sup>38</sup> Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.37-40

menjadi *ultimate target* dari kebijakan moneter, yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat;
2. Kesempatan kerja;
3. Kestabilan harga; dan
4. Keseimbangan neraca pembayaran.<sup>39</sup>

Idealnya, semua target kebijakan moneter tersebut dapat dicapai secara serempak dan optimal. Di Indonesia misalnya, kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral—sebelum UU BI No. 23 Tahun 1999—diharapkan secara serempak dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah, tingkat inflasi yang rendah, dan terpelihara keseimbangan neraca pembayaran. Namun berhubung sasaran-sasaran tersebut satu sama lain mengandung unsur-unsur yang bersifat kontradiktif, untuk mencapai semua sasaran dengan optimal dan serempak adalah sesuatu yang boleh dikatakan tidak mungkin.

Sebagai contoh, apabila bank sentral melakukan ekspansi moneter untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja, tindakan tersebut mempunyai dampak yang tidak menguntungkan terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Ekspansi moneter yang berlebihan cenderung mendorong laju inflasi, yang pada gilirannya akan memengaruhi kegiatan ekspor, impor barang dan jasa. Sebaliknya, kebijakan moneter yang ketat dapat menunjang tercapainya kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Namun, kebijakan tersebut akan mendorong kenaikan suku bunga yang pada gilirannya akan menghambat investasi dan produksi, yang akan mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan meluasnya tingkat pengangguran. Dalam teori ekonomi dikenal adanya *“trade-off”* antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan moneter, bank sentral dihadapkan terhadap dua pilihan. Pilihan *pertama*, bank sentral dapat memilih salah satu sasaran untuk dicapai secara optimal dan mengabaikan sasaran lainnya. Misalnya, memilih tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengabaikan tingkat inflasi. Pilihan *kedua*, bank sentral memilih pencapaian semua sasaran secara serempak, tetapi tidak ada satupun yang dicapai dengan optimal. Misalnya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu tinggi demi tetap terpeliharanya tingkat inflasi yang masih dapat ditoleransi.<sup>40</sup>

## INDIKATOR KEBIJAKAN MONETER

Di dalam proses pencapaian sasaran kebijakan moneter, sering dihadapkan dengan gejala perkembangan perekonomian yang menghambat sasaran yang ditetapkan. Sehubungan dengan itu diperlukan indikator (sasaran antara) yang dapat memberi petunjuk apakah perkembangan moneter tetap terarah pada usaha pencapaian sasaran akhir yang telah ditetapkan atau tidak.

---

<sup>39</sup> Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.26

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 40-41

Indikator tersebut umumnya dua hal, yakni suku bunga atau uang yang beredar. Dengan demikian, kedua variabel moneter tersebut memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sasaran menengah dan indikator. Dalam perumusan kebijakan moneter, kedua variabel tersebut digunakan sebagai sasaran antara karena merupakan variabel yang akan dicapai terlebih dahulu agar sasaran kebijakan moneter dapat dicapai, sedangkan dalam pelaksanaannya kedua variabel tersebut bertindak sebagai indikator karena memberi petunjuk tentang arah pengembangan moneter.

#### 1. Tingkat Suku Bunga

Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, bank sentral akan segera melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut.

Mekanisme penggunaan tingkat suku bunga sebagai sasaran antara dapat dijelaskan sebagai berikut.

Misalnya bank sentral menargetkan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun adalah tingkat suku bunga ideal yang dapat mendorong kegiatan investasi yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang diinginkan. Apabila ternyata suku bunga meningkat melampaui angka yang ditetapkan, bank sentral akan melakukan ekspansi moneter untuk menurunkan suku bunga sampai pada tingkat yang diinginkan. Sebaliknya, apabila suku bunga menurun, bank sentral akan melakukan kontraksi moneter.

Disini terlihat bahwa satu pihak suku bunga dapat diupayakan untuk tetap stabil, tetapi di pihak lain *monetary aggregate* akan bergejolak naik turun untuk mempertahankan suku bunga yang ditetapkan. Bergejolaknya besaran moneter ini dapat mengakibatkan terganggunya kestabilan harga.

#### 2. Uang Beredar (*Monetary Aggregate*)

Kebijakan moneter yang menggunakan *monetary aggregate* atau uang beredar sebagai sasaran menengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang stabil. Apabila terjadi gejolak dalam jumlah besaran moneter, yaitu melebihi atau kurang dan jumlahnya yang ditetapkan, bank sentral akan melakukan kontraksi atau ekspansi moneter sedemikian rupa sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang ditetapkan.

Namun, perlu dicatat bahwa pemilihan *monetary aggregate* sebagai sasaran menengah memungkinkan terjadinya gejolak suku bunga yang disebabkan oleh gejolak permintaan yang tidak dapat diimbangi oleh

penawaran uang. Besaran ini juga lazim disebut dengan jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter yang menetapkan jumlah uang yang beredar (uang primer), uang beredar dalam arti sempit dan dalam arti luas sebagai sasaran antara, mekanismenya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Misalnya bank sentral menargetkan penambahan uang beredar adalah 10% per tahun sebagai angka yang ideal untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan tingkat inflasi tertentu. Maka, apabila terjadi gejolak dalam jumlah uang beredar yang lebih tinggi atau rendah dari jumlah yang ditargetkan, bank sentral akan melakukan tindakan kontraksi atau ekspansi moneter sehingga jumlah uang yang beredar akan tetap pada suatu jumlah yang ditargetkan.

Dari uraian tersebut di atas terlihat apabila suku bunga dipilih sebagai sasaran antara, uang beredar akan bergejolak untuk mempertahankan suku bunga yang ditetapkan. Sebaliknya apabila jumlah uang beredar yang dipilih sebagai sasaran antara, suku bunga dapat bergejolak sesuai dengan kekuatan pasar.

## INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER

Didalam pelaksanaan kebijakan moneter, bank sentral biasanya menggunakan berbagai piranti sebagai instrumen dalam mencapai sasaran. Diantara instrumen itu adalah cadangan wajib (*reserve requirement*), operasi pasar terbuka (*open market operation*), fasilitas diskonto (*discount policy*) dan imbauan (*moral suasion*).

### 1. Reserve Require (RR)

*Reserve Require* atau disingkat sebagai RR adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid (*reserve*) sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya.

Semakin kecil persentase tersebut, semakin besar kemampuan bank memanfaatkan *reserve*-nya untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar kepada masyarakat. Sebaliknya semakin besar persentase, semakin berkurang kemampuan bank untuk memberikan pinjaman. Oleh karena itu, pinjaman perbankan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi uang beredar. Disinilah posisi RR yang dapat menjadi alat untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Di samping itu, penetapan besar kecilnya RR akan berdampak pada suku bunga. Makin tinggi RR akan mengakibatkan suku bunga pinjaman meningkat karena *cost of loanable fund* menjadi semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah RR semakin rendah pula suku bunga pinjaman (*leading rate*).

Apabila bank sentral memandang perlu untuk mengetatkan kebijakan moneter cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, dan demikian pula sebaliknya. Bank sentral berfungsi sebagai *leader of the last*

*resort*. Dalam melaksanakan fungsi ini, bank sentral dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dana.

Pinjaman tersebut pada umumnya berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. Saat ini, ketentuan mengenai RR yang juga dikenal dengan cadangan wajib atau Giro Wajib Minimum (GWM) adalah sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

## 2. Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka adalah kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral. Dalam kaitan ini penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral akan mempunyai dampak kontraksi moneter karena pengurangan alat-alat likuid bank-bank akan memperkecil kemampuan bank-bank memberikan pinjaman. Sebaliknya pembelian surat-surat berharga oleh bank sentral akan membawa dampak ekspansi moneter karena peningkatan alat-alat likuid bank-bank akan memperbesar kemampuannya dalam pemberian pinjaman.

OPT dilaksanakan untuk memengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang gilirannya akan memengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah melalui Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI).<sup>41</sup>

Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Sementara itu, kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh bank sentral untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga. Dalam pengendalian moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran, OPT akan menjadi instrumen andalan. Akan tetapi dari penggunaan SBI dan SBPU berbeda dari pengendalian secara kuantitas. Transaksi jual beli SBI dan SBPU harus lebih diarahkan untuk mempengaruhi suku bunga di pasar uang daripada untuk mencapai sasaran besaran-besaran moneter tertentu.

Esensi penerapan sasaran suku bunga dalam konteks mekanisme pasar adalah bank sentral mengendalikan harga (suku bunga) dari dana kliring antarbank. Persyaratan bekerjanya sistem tersebut adalah bank-bank memiliki permintaan akan dana kliring antarbank yang stabil dan

---

<sup>41</sup> A. Mahendra, Analisis kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (2008)

bank sentral mampu mengendalikan suplai dana kliring antarbank tersebut.<sup>42</sup>

### 3. Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto adalah kebijakan moneter bank sentral untuk memengaruhi jumlah uang beredar melalui penetapan diskonto pinjaman bank sentral kepada bank-bank. Dengan menetapkan diskonto yang tinggi diharapkan bank-bank akan mengurangi permintaan kredit dan bank sentral, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya penetapan diskonto yang rendah akan mendorong bank-bank meningkatkan permintaan pinjaman bank sentral yang selanjutnya akan menambah jumlah uang beredar.

### 4. Foreign Exchange Intervention

Intervensi valuta asing adalah kebijakan bank sentral untuk memengaruhi jumlah uang beredar atau likuiditas dipasar uang melalui jual beli valuta asing atau cadangan devisa. Dalam hal ini bank sentral ingin mengetatkan likuiditas rupiah di pasar uang, bank sentral akan menjual cadangan devisanya. Sebaliknya, pembelian valuta asing oleh bank sentral akan meningkatkan likuiditas rupiah di pasar uang.

### 5. Moral Suasion

Selain instrumen-instrumen diatas, bank sentral juga dapat melakukan imbauan kepada bank-bank untuk melakukan kebijakan tertentu. Imbauan ini bersifat tidak mengikat, tetapi sebagai lembaga yang kredibel imbauan bank sentral biasanya memiliki dampak yang cukup efektif dalam kebijakan moneter.

Dari bagan tersebut secara sederhana dapat digambarkan bahwa bank sentral dapat menggunakan piranti yang dikuasanya untuk mengontrol salah satu dan variabel indikator yang dipilih sebagai target antara. Kemudian indikator tersebut diarahkan sedemikian rupa sehingga dalam jangka panjang target akhir yang ditetapkan dapat tercapai.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Perry Warjiyo dan Doddy Zulverdi, *Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter Di Indonesia*

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 29

## **BAB VIII**

### **KEBIJAKAN MONETER ISLAM**

#### **KEBIJAKAN MONETER TANPA BUNGA**

Bunga sesungguhnya merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian karena bunga adalah instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan sektor riil dan moneter. Dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal instrumen suku bunga, sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (profit and sharing), bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka. Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukannya di sektor riil. Jadi, dalam sistem keuangan Islam hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Artinya sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor riil jika investasi dan produksi di sektor riil berjalan dengan lancar, maka akan meningkat pula.

Namun, tidak adanya instrumen bunga di dalam ekonomi Islam menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mengelola kebijakan moneter dengan ketiadaan sistem bunga ini. Maklum dunia modern saat ini adalah dunia yang sudah sekian lama didominasi sistem kapitalis dengan instrumen bunganya, maka kehadiran sistem lain yang menafikan kehadiran bunga jelas akan menimbulkan tanda yang besar. Sistem keuangan Islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna sistem ekonomi Islam yang berdasarkan kepada produksi dan perdagangan, atau dikenal dengan istilah sektor riil. Kegiatan yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan akan uang untuk tingkatan pendapatan agregat tertentu.

Dalam perekonomian Islam, keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Salah satu instrumen untuk menjaga adalah sistem perbankan Islam. Pada perekonomian kapitalis yang menggunakan instrumen bunga, permintaan akan uang karena motif spekulasi.<sup>44</sup>

Sejumlah faktor lain akan memperkuat kondisi, antara lain:

1. Karena tidak ada aset berbasis bunga, maka seseorang yang memiliki dana hanya akan memiliki pilihan untuk menginvestasikan dananya dalam skema bagi hasil, tentu saja dengan resiko tertentu, akan mendiamkan uangnya tidak produktif tersimpan di tangannya

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 263

2. Peluang investasi jangka pendek dan jangka panjang, dengan berbagai tingkatan resiko akan tersedia bagi investor tanpa memandang, apakah mereka adalah pengambil resiko tinggi atau rendah, sejauh mana resiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.
3. Kenali dalam keadaan resesi, rasanya tidak akan nada orang yang menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga membeku begitu saja
4. Berbeda dengan suku bunga, laju keuntungan dalam skema bagi hasil tidak ditentukan di depan.<sup>45</sup>

Karena itu, kebijakan moneter yang diinformasikan dalam sebuah perekonomian islam, adalah menggunakan variable cadangan uang dan bukan suku bunga. Harulah disadari, untuk mewujudkan sasaran islam, tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter, dan pendapatan, harus sejalan seirama.

## SEJARAH KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perubahan, sistem keuangan inilah yang paling dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi yang lain. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah di gunakan *bimetallic standard* yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah ini relative stabil dengan nilai kurs dinar-dirham 1:10. Namun demikian, stabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara suplay dan demand. Misalkan pada pemerintahan Umayyah (41/662-132/750) rasio kurs antara dinar-dirham 1:12, sedangkan pada masa Abbasiyah (132/750-656/1258) berada pada kisaran 1:15.

Disamping nilai tukar pada dua pemerintahan ini, pada masa yang lain nilai tukar dinar dan dirham mengalami berbagai fluktuasi dengan nilai paling rendah pada level 1:35 sampai 1:50 instabilitas dalam nilai tukar uang ini akan mengakibatkan terjadinya *bad coins to drive good coins out of circulations* atau uang kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baiik, dalam literatur konvensional peristiwa ini disebut sebagai *hukum Gresham*. Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Bany Mamluk (1263-1328 M), dimana mata uang logam yang beredar terbuat dari fulus (tembaga) mendesak keberadaan uang logam emas dan perak peristiwa ini terjadi bila uang dari jenis dinar (emas) dan (dirham) menghilang dari peredaran karena adanya perbedaan nilai kurs dengan daerah lain. Sebagai contoh bila kurs diwilayah pemerintahan Bany Mamluk 1:20 antara dinar-dirham, sedangkan di daerah lain 1:25 maka emas yang berada di daerah Bany Mamluk akan dibawa ke daerah lain yang akan dapat ditukarkan dengan 25 fulus, tentu saja perbedaan nilai ini akan mengakibatkan emas

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 264



diperedaran akan menghilang. Oleh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik.<sup>46</sup>

Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami tiga kali evolusi yaitu :

1. *The gold coin standard* : dimana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran
2. *The gold bullion standard* : dimana logam emas bukanlah alat tukar yang beredar namun otoritas moneter menjadikan logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar.
3. *The gold exchange standard (Bretton woods system)* : dimana otoritas moneter menentukan nilai tukar *domestic currency* dengan *foreign currency* yang mampu di *back-up* secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang fiducier (*credit money*) yaitu uang yang keberadaannya tidak di *back-up* oleh emas dan perak.

## MANAJEMEN KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Dasar pemikiran dari manajemen moneter dalam konsep Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif. Sehingga, setiap instrument yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan ditinggalkan.

Dalam teori Keynes telah dikenal bahwa adanya permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipengaruhi oleh keberadaan suku bunga. Pergerakan suku bunga merupakan refleksi pergerakan permintaan uang spekulatif. Semakin tinggi permintaan uang untuk spekulasi, maka semakin rendah tingkat bunga yang berlaku dipasar. Begitu juga sebaliknya, apabila permintaan uang spekulatif menurun, maka suku bunga akan relatif meningkat.

Penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, menghilangkan insentif orang untuk memegang uang *idle* sehingga mendorong orang untuk melakukan :

- Qard (meminjamkan harta kepada orang lain)
- Penjualan (*muajjal*)
- Mudarabah

Para pemilik dana akan menginvestasikan dananya pada kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar, jadi semakin tinggi permintaan uang untuk investasi di sektor riil atau kebutuhan akan persediaan dana untuk investasi semakin besar maka, tingkat keuntungan harapan yang akan diberikan akan relatif menurun. Karena besarnya tingkat *actual return* ini tidak berfluktuatif seperti halnya suku bunga maka akan menjadikan permintaan uang akan lebih stabil.

---

<sup>46</sup> Adiwarmanto A. Karim. *Ekonomi makro Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2014), h. 177

## PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Secara khusus kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki.

Kebijakan moneter dalam islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut.
2. Manusia merupakan pemimpin (*kholifah*) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
5. Kekayaan harus diputar.
6. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.
7. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Dalam aspek teknis, kebijakan moneter islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.<sup>47</sup>

Adiwarman Azwar Karim tidak menyatakan bahwa Islam tidak mengisyaratkan secara jelas bentuk dan macam uang yang diperbolehkan. Tidak ada nash yang jelas baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyatakan harus dengan menggunakan dinar (emas) atau dirham (perak) sebagai mata uang yang sah. Bahkan dikatakan khalifah Umar bin Khatab pernah menggunakan mata uang *fiducier* dalam bentuk kulit binatang sebagai mata uang untuk kegiatan transaksi. Pandangan ini selaras dengan gagasan Imam Ahmad bin Hambal, Ibn Hazm, dan Ibn Taimiyah dengan catatan pemerintah harus mampu menjaga stabilitas nilai mata uang yang digunakan.

Pandangan ini juga sama dengan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali bahwa tugas pemerintah adalah bagaimana menjaga stabilitas nilai mata uangnya dengan mengatur jumlah uang beredar, dan mengantisipasi adanya perdagangan

---

<sup>47</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: IIIT, 2001), h.

uang. Al-Qur'an hanya menekankan perlunya uang digunakan untuk kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat.<sup>48</sup>

## SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MONETER ISLAM

System moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, system keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi yang lainnya. system keuangan pada zaman Rasulullah digunakan *bimetallic standard*, yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Sebuah pertanyaan awal yang mesti dijawab adalah apakah keberadaan *fiduciary money* dalam ekonomi islam diperbolehkan?

Adakah mekanisme yang memungkinkan untuk mencapai kestabilan nilai tukar fiduciary money dengan menghilangkan pengaruh suku bunga dan instrumen lain yang dilarang dalam syariah?

Dalam Al-Qur'an maupu Sunnah tidak ditemukan secara spesifik keharusan untuk menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai standard nilai tukar uang (*full-bodied monometallic standard*). Khalifah bin Khatab (23/644), telah mencoba untuk memperkenalkan jenis uang dari kulit binatang. Oleh beberapa fuqaha terkemuka keberadaan uang fiducier ini juga mendapatkan dukungan seperti Ahmad Ibn Taimiyah (505/1328). Merujuk dari pendapat para fuqaha ini tidak ditemukan akan keharusan memakai emas dan perak full-bodied money merupakan sebuah kelaziman.

Namun disamping membolehkan uang fiducier, Ibn Taimiyah mengingatkan bahwa penggunaan uang ini akan mengakibatkan kehilangan uang dinar dan emas dari peredaran kerana adanya hukuman Gresham. Imam Al-Ghazali (1058-111) memperbolehkan menggunakan uang yang tidak dikaitkan dengan emas / perak selama pemerinth mampu menjaga nilainya.

Kesetabilan makro ekonomi merupakan hasil dari sebuah upaya yang konsisten dan integral yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah melalui kebijakan moneter, perbankan dan fiskal. Di bidang moneter, strategi kenijakan moneter untuk secara konsisten diarahkan secara kestabilan harga melalui pencapaian target inflasi jangka panjang dngan tetap memberikan ruang gerak pada kestabilan pada pemulihan ekonomi jika inflasi bergerak pada arah yang kondusif. Di bidang perbankan, restrukturisasi dan reformasi sector perbankan terus dilakukan untuk memperbaiki struktur menuju system perbankan yang tangguh yang ikut memebrikan kontribusinya dalam menciptakan stabilitas system keuangan.<sup>49</sup>

## INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besa yaitu (a) Kontrol Kwantitatif pada penyaluran dana dan (b)

---

<sup>48</sup> Imamudin Yuliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 223

<sup>49</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),

Methodes yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif.

Bagaimana mengelola kebijakan moneter dalam konteks ekonomi islam, masih belum terlalu banyak dibahas. Tahapan yang dibicarakan masih seputar metodologi dan epistemologinya. Meskipun tidak menerima sepenuhnya sistem yang ada sekarang, dengan beberapa catatan kita bisa menggunakan framework sistem keuangan dan moneter umat. Maka yang bisa dilakukan dalam keadaan begini adalah mencoba, secara bertahap dan konsisten, menawarkan sistem moneter islam sedikit demi sedikit. Lalu instrumen semacam apa yang dapat digunakan untuk mengelola kebijakan moneter yang tidak saja akan membantu mengatur penawaran uang seirama terhadap permintaan riil terhadap uang, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar riil dan mencapai sasaran sosioekonomi masyarakat islam lainnya.

Kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dapat berupa; *Pertama, Statutoryreserve requirement*. Instrumen ini pada ekonomi Islam merupakan instrument yang penting karena diskont rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposit pada bank sentral sebagai statutory reverse. Reserve requirement ini hanya berlaku pada demand deposit bukan pada mudarabah deposit, karena mudarabah deposit merupakan penyertaan (*equity*) dari penabung pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi. Sistem ini akan berlangsung baik bila ditunjang dengan pengawasan bank yang baik pula.

*Kedua Credit Ceiling*. Yaitu, batasan nilai kredit tertinggi yang bias diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Dengan hanya mengandalkan reserve requirement yang memudahkan bank sentral melakukan penyesuaian pada High Powered Money, belum menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena aliran dana yang dapat di perkirakan dengan tepat masuk dalam sistem perbankan hanya yang berasal dari bermudarabahnya bank sentral dengan bank komersial, sedangkan aliran dana dari sumber lain yang masuk dalam sistem perbankan sulit ditentukan secara akurat. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah tidak jelasnya hubungan antara reserve requirement yang ada pada bank komersial dengan ekspansi kredit. Singkatnya, perilaku money suplay mencerminkan interaksi berbagai faktor-faktor internal dan eksternal yang kompleks maka sebaiknya ditetapkan kredit ceiling.

*Ketiga, Demand Deposit*. Untuk mempengaruhi reserves pada bank komersial pemerintah berwenang memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial. Instrumen ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, dimana bank sentral mempengaruhi langsung terhadap bank komersial.

Keempat, *Common Pool*. Yaitu, Instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Instrumen ini memiliki kemiripan fungsi dengan fasilitas rediskounto pada bank sentral konvensional untuk memecahkan masalah likuiditas.

*Kelima, Moral Suasion.* Yaitu kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan bank sentral dengan bank komersial untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan instrument ini bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan yang telah direncanakan.

Selanjutnya, Metode yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif, meliputi; *Pertama, Treating the Created Money as Fay*. Uang inti yang diciptakan bank sentral berasal dari pelaksana hak prerogratif. Hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil dari pada nominalnya atau dikenal dengan money seigniorage. Oleh karena itu, dengan adanya seigniorage tersebut, maka sewajarnya bank sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai fay atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dana ini tidak boleh digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang hanya menguntungkan golongan kaya. Dengan instrument ini alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan produktif.

*Kedua, Goal Oriented Allocation of Credit.* Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis, akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusi kesemua lapisan masyarakat. Pada kenyataannya hal ini sulit terjadi karena dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umum berasal sebagian besar dari penabung kecil, namun pemanfaatannya dalam bentuk kredit lebih tertuju pada pengusaha-pengusaha besar. Keengganan perbankan menyalurkan kredit pada usaha kecil karena adanya resiko yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih besar dalam pembiayaan usaha kecil. Konsekwensi dari hal ini adalah usaha kecil sangat sulit memperoleh pembiayaan dari bank, walaupun bank bersedia menyediakan dana untuk pembiayaan usaha kecil, namun disertai dengan berbagai persyaratan yang sulit bagi mereka, utamanya persyaratan jaminan. Dengan kondisi demikian, maka dapat diperkirakan pertumbuhan dan kelangsungan usaha kecil menjadi terancam walaupun sebenarnya usaha kecil berpotensi dapat memperluas kesempatan kerja. Menghasilkan produksi dan dapat memperbaiki distribusi pendapatan.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Melalui skim jaminan ini, bank tidak diharuskan meminta jaminan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam hal ini bank menghadapi tantangan dari pembiayaan yang dilakukannya, yaitu perusahaan yang dibiayai gagal dalam usaha. Bila kegagalan tersebut karena penyimpangan moral, maka bank akan memperoleh dana kembali, akan tetapi bila

kegagalan tersebut akibat kondisi ekonomi yang buruk, maka bank harus ikut menanggung resiko.<sup>50</sup>

## KEBIJAKAN MONETER PADA MASA RASULULLAH SAW

Perekonomian jazirah Arabia ketika jaman Rasulullah merupakan ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum dittemukan dan sumber daya lainnya masih terbatas. Lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai jalur dagang selatan. Sedangkan antara Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang utara. Antara Syam dan Yaman disebut sebagai jalur dagang utara selatan.

Perekonomian Arab di jaman Rasulullah SAW, bukanlah ekonomi terbelakang yang mengenai barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Pada masa itu telah terjadi. Valuta asing dari persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah Dinar dan Dirham. Sistem devisa bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar atau dirham.

- a. Transaksi tidak tunai diterima luas dikalangan pedagang.
- b. Cek dan *promissory note* lazim digunakan, misalnya Umar bin Khattab r.a. menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah.
- c. *Instrumen factory* (anjak piutang) yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama *al-hiwalah*, tetapi tentunya bebas dari unsur bunga

Pada masa itu, bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila permintaan uang turun, barang impor nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya. Sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak. Tidak terjadi kelebihan atau permintaan akan uang, sehingga nilai uang stabil.

Permintaan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang yang riil dilarang. Penimbunan mata uang dilarang-larang sebagaimana penimbunan barang juga dilarang. Transaksi *talaqqi rukban* dilarang, yaitu mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga. Hal demikian merupakan tindakan distorsi harga. Distorsi harga merupakan cikal bakal spekulasi. Transaksi *kali bi kali* dilarang, yaitu bukan transaksi dan bukan pula transaksi tunai.

Keistimewaan dalam Islam dalam hal transaksi adalah bahwa transaksi tunai boleh, transaksi tidak tunai boleh namun melarang transaksi *future* tanpa ada barangnya. Transaksi maya merupakan salah satu unsur riba. Sagala bentuk riba dilarang. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau penawaran uang baru melalui percetakan defisit anggaran.

---

<sup>50</sup> Justitia Islamica, *Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-prinsip Islam*. Vol. 10 No. 1, Juni 2013, h. 73, 12 Maret 2020

Di dalam Islam, yang dilakukan adalah mempecepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah disebabkan oleh kelebihan likuiditas. Uang tidak boleh ditimbun dan dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penarikan uang adalah dianjurkan dengan jalan *Qardh* (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerja sama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah.

Keuntungan utama dari kerja sama bisnis adalah pelaku dan penandang dana bersama-sama mendapat pengalaman, informasi, metode supervisi, manajemen dan pengetahuan akan risiko suatu bisnis. Akumulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat resiko investasi. Jelaslah kebijakan moneter Rasulullah SAW selalu terkait dengan sektor riil perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas.<sup>51</sup>

## KEBIJAKAN MONETER ISLAM MENURUT MAS'UDUL ALAM CHOUHDURY

Pandangan uang dan kebijakan moneter menurut masu'udul alam choudhury berpijak pada prinsip dasar uang sebagai alat transaksi dan tidak dimasukkannya instrumen bunga (interest) dalam analisis moneter. Pandangan uang menurut masu'udul alam choudhury dikemukakan melalui konsep ekonomi moneter yaitu *endogenous money* yang memberi tekanan maupun eksternal yaitu keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Pandangan tentang uang dan kebijakan moneter menurut choudhury secara sederhana dapat dirumuskan bahwa uang dan kebijakan moneter dalam islam harus bertumpu pada kegiatan di sektor riil (*underlying transactions*) bukan di sektor moneter. Esensinya uang dan instrumen moneter hanyalah '*instrumen ekonomi*' semata untuk menggerakkan sektor riil bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat terwujud dari perkembangan pada sektor riil bukan pada sektor moneter.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2002), h. 142

<sup>52</sup> Imamudin Muliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 211-223.

## **BAB IX**

### **DUAL FINANCIAL SYSTEM DI INDONESIA**

#### LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyatakan Bank Indonesia memiliki kewenangan menerapkan kebijakan moneter menggunakan instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, disamping instrument moneter konvensional.

Wewenang Bank Indonesia juga tertuang pula dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Nomor 18/7/PDG/2016 mengenai Kerangka Kerja Kebijakan Moneter, yang menjelaskan bahwa operasi moneter dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Operasi moneter syariah merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan moneter dalam rangka implementasi kebijakan moneter. Dengan demikian, kerangka kebijakan moneter syariah yang dilaksanakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter adalah kebijakan moneter syariah yang berada dalam *dual financial system*.

#### DUAL FINANCIAL SYSTEM

*Dual Financial System* maksudnya adalah bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis syariah. Bagi yang mengkonversi banknya menjadi perbankan syariah, maka seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah, sedangkan bagi yang melakukan kedua-duanya maka mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa, terutama yang menyangkut interaksi antara kegiatan-kegiatan yang berbasis bunga yang merupakan kekhasan dari perbankan konvensional dengan kegiatan yang bebas bunga yang merupakan kekhasan dari perbankan syariah, sehingga antara keduanya dapat dipisahkan.

Pada bank yang beroperasi secara konvensional, pendapatan bank yang utama berasal dari bunga yang dihitung berdasarkan pada prosentase tertentu dari pinjaman yang diberikan oleh bank, dan selain itu bank konvensional juga mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar prosentase tertentu atas simpanan dari nasabahnya.

Sementara bank yang beroperasi secara prinsip syariah, memperoleh pendapatannya dengan adanya pembagian laba yang dihitung secara proporsional antara pinjaman atau kredit yang diberikan bank dengan modal keseluruhan yang dipunyai perusahaan dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan/kredit. Hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan yang sudah disetujui keduanya dan dituliskan dalam bentuk nisbah. Seperti halnya pada bank konvensional, bank yang beroperasi secara prinsip syariah juga mempunyai kewajiban untuk memebalikan bagi penyimpan dana, imbalan tersebut juga diberikan dalam bentuk bagi hasil setelah dihitung secara proporsional terhadap jumlah total masing-masing jenis simpanan.



## IMPLEMENTASI DUAL FINANCIAL SYSTEM DI INDONESIA

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menegaskan bahwa BI selaku otoritas perbankan perlu untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Berdasarkan pada undang-undang tersebut, Bank Indonesia adalah otoritas moneter yang memiliki tugas pokok, yaitu:

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
3. Mengatur dan Mengawasi Bank<sup>53</sup>

Tumbuhnya industri keuangan syariah sebagai respon atas kebutuhan jasa keuangan yang sesuai dengan mayoritas agama penduduk Indonesia mendorong munculnya sistem keuangans syariah dalam sistem keuangan nasional, yakni sistem keuangan ganda atau *Dual Finance System*. Sistem keuangan ganda yaitu dimana sistem keuangan konvensional dan syariah hadir berdampingan dalam mendukung terciptanya sistem keuangan yang sehat dan kuat yang diharapkan mampu berkontribusi signifikan untuk pembangunan ekonomi konvensional.

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk perumusan kebijakan moneter syariah dalam sistem keuangan ganda, agar lebih dapat memenuhi prinsip syariah dan efektif sebagai kebijakan diantaranya:<sup>54</sup>

1. Arah kebijakan moneter untuk masing-masing sistem, tetapi keduanya harus mempertimbangkan ketersediaan likuiditas bagi kelancaran keuangan dan pembangunan ekonomi.
2. Infrastruktur hukum yang jelas.
3. Pengembangan pasar modal dan pasar keuangan yang berbasis bagi hasil.
4. Penyusunan sebuah Master plan pengembangan sistem keuangan syariah nasional.
5. Mendorong kecukupan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dalam keuangan syariah.
6. Mendorong penggunaan beberapa alternatif instrumen berbasis syariah untuk kebijakan moneter.
7. Serta penguatan langkah bersama khususnya otoritas-otoritas lembaga keuangan syariah dalam menciptakan lingkungan industri keuangan syariah yang kondusif bagi praktik-praktik kebijakan moneter syariah dan penggunaan instrument moneter syariah dalam rangka mewujudkan industry keuangan syariah yang ideal.

---

<sup>53</sup> Maulana Hamzah, "Optimalisasi Peran Dual Banking System Melalui Fungsi Strategis JUB dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia", *La\_Riba*, Vol 3, No 2, Desember 2009, 202

<sup>54</sup> Solikin, dkk. *Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda*. (Jakarta: Tazkia Publishing, 2018)

Implementasi kebijakan moneter dalam dual financial system di Indonesia:

### 1. Asset

Bisnis perbankan mempunyai kekhususan yang dapat diuraikan sebagai berikut<sup>55</sup>:

- a. Produk dari industri perbankan berupa jasa di bidang keuangan yang mempunyai bentuk dan dimensi beragam.,
- b. Sebagian besar asset bank berupa *monetary assets* dan di sisi lain *fisical assets* relative sangat kecil.,
- c. Sebagian besar asset bank berupa alat likuid (*current assets*) sedangkan *fixed assets* juga relatif kecil.,
- d. Dalam operasinya bank terlibat dengan jenis mata uang asing yang beraneka ragam, dimana mata uang asing tersebut mempunyai nilai yang beraneka ragam dan cepat mengalami perubahan (*volatile*).,
- e. Bank beroperasi dengan cabang yang banyak dan tersebar dengan area yang luas.,
- f. Uang dalam bisnis perbankan mempunyai 2 fungsi, pertama sebagai barang yang diperdagangkan dan yang kedua sebagai alat likuid yang harus dipertahankan dalam bank.,
- g. Dan lain-lain.

Kualitas aset yang rendah bagi suatu bank akan merupakan tekanan yang berat terhadap kebutuhan dana bagi bank yang bersangkutan, karena adanya *negative multiplier effect* terhadap penurunan dana. Hal ini terlihat antara lain:

- a. Asset (*earning assets*) suatu bank akan merupakan sumber pendapatan/laba yang akan menjadi salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan. Dengan rendahnya kualitas asset suatu bank akan menimbulkan kerugian yang justru akan mengurangi volume dana yang dimilikinya.
- b. Asset suatu bank yang rendah kualitasnya berarti mempunyai turn over yang lambat, dan akan mengakibatkan pemborosan sumber dana karena dana tersebut berarti dan tidak dapat ditanamkan ke *earning assets* lainnya.
- c. Asset suatu bank yang rendah akan mengakibatkan besarnya cadangan aktiva yang diklasifikasikan untuk bank yang bersangkutan semakin besar. Cadangan ini nantinya akan dipakai untuk *write off assets* tersebut apabila benar-benar tidak dapat lagi ditarik dari debitur. Hal ini berarti akan mengakibatkan berkurangnya volume dana (modal) yang dimiliki.<sup>56</sup>

Kondisinya tentu akan berlainan apabila sebagian besar (100%) dari asset bank yang bersangkutan merupakan asset produktif maka akan menciptakan sumber dana secara *positive multiplier effect* terhadap bank yang bersangkutan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Teguh Pudjo Mulyono, *Bank Budgeting Profit Planning & Control* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996), h. 1.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 140.

- a. Asset yang produktif akan menciptakan pendapatan/laba yang dapat digunakan untuk menumpuk modal
- b. *Turn over assets* yang cepat akan mengakibatkan efisiensi pemakaian asset
- c. Asset yang produktif tersebut dapat juga dipakai untuk melakukan penetras pasar produk dan jasa bank lainnya, sehingga bank yang bersangkutan dapat memanfaatkan *overhead* secara maksimal dan biaya *overhead* akhirnya dapat ditekan lebih rendah. Disamping itu, dengan asset yang produktif ini, dapat dikembangkan sumber-sumber dana baru yang berupa *derivativeproduct* dari assets itu sendiri.
- d. Apabila sebagian besar asset bank berupa asset yang produktif, maka bank yang bersangkutan tidak perlu membentuk cadangan aktiva yang diklasifikasikan terlalu besar, dan tidak perlu melakukan *write off* dari assetnya.

## 2. DPK (Dana Pihak Ketiga)

Sumber dana pihak ketiga merupakan porsi sumber dana terbesar bagi setiap bank dibanding dengan sumber dana dari ke-3 kelompok lainnya. Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank dengan melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan kepada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan dan memutarakan uangnya untuk kemudian ditarik kembali pada saat jatuh temponya dengan imbalan bunga maupun *capital gain* dari bank tersebut. Ada beberapa kelompok anggota masyarakat yang menjadi sumber dana bank antara lain:<sup>57</sup>

- a. Kelompok masyarakat perorangan/rumah tangga
- b. Kelompok perusahaan, swasta, pemerintah, asing
- c. Kelompok bank dan lembaga keuangan
- d. Kelompok yayasan, lembaga pemerintah, lembaga non profit.

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 198 dijelaskan tentang Sistem Bagi Hasil (Profit Sharing) Atau Prinsip Mudharabah Dan Murabahah yang Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*

## 3. Kredit/Pembiayaan UMKM

Kredit bagi setiap bank mempunyai arti yang strategis dalam pengembangan bisnis bank yang bersangkutan. Mengingat kredit mempunyai berbagai manfaat yang besar bagi bank, antara lain:

- a. Sebagai sumber pendapatan yang terbesar yang berupa bunga. Dengan adanya pendapatan bunga ini memungkinkan setiap bank untuk dapat mengembangkan usahanya, apabila kredit yang diberikan dapat berjalan lancar

---

<sup>57</sup> Mulyono, *Bank Budgeting*, 1.

- b. Untuk menjaga solvabilitasnya, sebab kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank yang terbesar. Dengan demikian diharapkan dari kredit yang lancar tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjam dari masyarakat.
- c. Kredit dapat dipakai sebagai alat yang sangat baik untuk memasarkan produk jasa bank lain, bahkan saat ini ada suatu pameo yang mengatakan pemberian kredit semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga sudah mubazir.
- d. Dengan menyalurkan kredit akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain.

#### **4. GMW (Giro Wajib Minimum)**

Dalam pelaksanaannya GMW ini besarnya adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Sedangkan dana pihak ketiga yang dimaksud disini adalah dalam bentuk:

1. Giro wadhi'ah
2. Tabungan mudhorobah
3. Deposito investasi mudhorobah
4. Kewajiban lainnya

Sertifikat Investasi Mudhorobah antar bank syariah (IMA) Sertifikat Wadhi'ah Bank Indonesia (SWBI) adalah instrumen BI yang sesuai dengan syariah islam yang digunakan.

## **BAB X**

### **ARAH PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM**

#### **ANALISIS TEORI DAN PRAKTIK MONETER ISLAM DI INDONESIA**

Arah pengembangan kebijakan moneter Islam dalam *dual financial system*, tetap merujuk pada pengembangan yang mendorong pencapaian maksimal pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan meningkatkan lapangan kerja.

Analisis teori dan praktik moneter Islam akan bermanfaat untuk menilai sejauh mana praktik moneter Islam berbeda dengan bentuk idealnya, dan dapat mengidentifikasi apakah praktik moneter Islam bergerak menjauh atau mendekat dari bentuk yang ideal. Pada tingkat tertentu analisis ini dapat mengidentifikasi langkah apa saja yang dapat diambil dalam rangka mewujudkan Kebijakan Moneter Islam dan Instrumen Moneter Islam yang ideal. Ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian dalam rangka pengembangan kebijakan moneter Islam sekaligus menentukan instrumen moneter syariah apa yang sesuai dengan model ekonomi Islam.

Beberapa isu tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Aplikasi keuangan konvensional dan Islam dalam system dalam system keuangan di Indonesia masih berada dalam satu payung otoritas yang mengedepankan satu sinyal kebijakan yang tidak bertentangan. Hal ini tentu menyulitkan kebijakan moneter Islam.
2. Logika keuangan menggunakan prinsip konvensional yang terfokus pada pengendalian uang beredar masih dominan.
3. Referensi kebijakan dan instrument moneter yang masih terbatas, sehingga belum diperoleh satu set kebijakan dan instrumen kebijakan yang sesuai dengan kondisi lingkungan keuangan yang ada di Indonesia
4. Beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan otoritas moneter menjalankan kebijakan moneter Islam atau menggunakan instrument moneter Islam
5. Infrastruktur yang belum lengkap sehingga membuat kebijakan moneter Islam dan penggunaan instrument moneter Islam tidak optimal.<sup>58</sup>

#### **PENGEMBANGAN MONETER ISLAM**

Pra kondisi fundamental dalam pengembangan system keuangan syariah yang kuat adalah situasi kondusif bagi pengembangan system itu sendiri. Situasi kondusif tersebut dibangun melalui kebebasan operasional yang menjunjung tinggi prinsip keadilan serta pasar yang transparan atau *Fully Information*.

Tujuan kebijakan moneter Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter yang berlaku secara umum (konvensional) yaitu menjaga stabilitas harga dan nilai tukar sehingga pertumbuhan ekonomi yang

---

<sup>58</sup> Solikin M. Juhro, dkk. *Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda Teori dan Praktik*, (Jakarta : Tazkia Publishing, 2018),h.217-220

diharapkan tercapai. Adapun perbedaan yang muncul berasal dari konsep penggunaan uang dimana konsep Islam hanya menekankan motif penggunaan uang pada aspek fasilitasi transaksi dan *store of value*. Motif spekulasi yang mendasarkan pada anggapan bahwa uang merupakan bentuk dari komoditi dianggap melanggar prinsip Islam yang melarang *maisir*. Walaupun memiliki tujuan yang sama, proses pencapaian operasi moneter memiliki beberapa perbedaan secara teknis.

Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrument tersebut adalah bahwa prinsip Islam berlaku di Indonesia tidak diperbolehkan adanya transaksi jual beli utang ataupun yang berbasis uang serta jual beli *rate of return* berbasis suku bunga dalam operasi moneter syariah tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme penentuan tingkat suku bunga. Mengingat hal tersebut, kebutuhan untuk menciptakan instrument moneter berdasarkan prinsip Islam menjadi sangat penting dalam mempertahankan tingkat kontrolabilitas bank sentral terhadap system keuangan Islam.

Secara jangka panjang, operasi moneter yang dilaksanakan harus pula dapat menyesuaikan dengan perkembangan konsep stabilisasi moneter yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai otoritas moneter adalah sebagai berikut :

1. Memformulasi kebijakan moneter menggunakan instrument moneter Islam yang tepat dalam bingkai *dual Financial System* yang memiliki satu payung otoritas yang mengedepankan satu sinyal kebijakan yang tidak bertentangan dengan filosofi ekonomi dan keuangan Islam, secara bertahap.
2. Melakukan terobosan pada formulasi kebijakan moneter yang tidak hanya terfokus pada pengendalian uang beredar, tetapi juga membuka peluang pada formulasi kebijakan moneter yang erat kaitannya dengan aktifitas sektor riil.
3. Melakukan eksplorasi keilmuan dengan mengajak para pakar dan praktisi dalam rangka menemukan set kebijakan dan instrumen moneter yang sesuai dengan kondisi lingkungan keuangan yang ada di Indonesia.
4. Melakukan pendekatan untuk dapat menyesuaikan beberapa peraturan perundang-undangan agar dimungkinkan otoritas moneter menjalankan kebijakan moneter Islam.
5. Mendorong kelengkapan infrastruktur sehingga membuat kebijakan moneter Islam dan penggunaan instrumen moneter Islam menjadi optimal
6. Melakukan upaya agar skala industri keuangan dan perbankan Islam terhadap volume ekonomi menjadi membesar, sehingga peran kebijakan moneter Islam menjadi efektif.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*,h.236-241

## **BAB XI**

### **STANDAR MONETER INTERNASIONAL**

#### STANDAR MONETER INTERNASIONAL

Standar Moneter Internasional adalah sesuatu barang atau mata uang yang diterima oleh mayoritas negara-negara di dunia sebagai mata uang dunia. Mata uang dunia ini persis seperti halnya mata uang di dalam sesuatu negara, harus memenuhi keempat fungsi uang. Hanya saja, standar moneter internasional harus diterima, tidak hanya oleh para warga negara didalam satu negara, tetapi oleh para warganegara dari mayoritas negara-negara di dunia.

Sebelum perang dunia I, standar moneter yang diterima oleh mayoritas negara-negara adalah suatu barang yang disebut dengan emas. Namun setelah perang dunia I, emas mulai ditinggalkan sebagai satu-satunya standar moneter internasional. Sebab utama emas ditinggalkan dari standar moneter internasional bukan karena orang-orang dari negara-negara tidak lagi percaya pada nilai emas, melainkan karena jumlah emas yang tersedia semakin tidak cukup untuk menunjang transaksi-transaksi nasional maupun internasional.

Setelah perang dunia II, perdagangan luar negeri antar bangsa-bangsa semakin membesar, dan emas yang telah dibebaskan dari peranannya sebagai standar moneter dalam negeri itupun ternyata tidak cukup persediaannya untuk menyangga volume transaksi perdagangan dunia. Krisis likuiditas dunia muncul dan negara-negara di dunia mulai mencari alternatif. Mulai pecah perang dunia II sampai awal tahun 60-an, mata uang dollar Amerika merupakan standar moneter internasional.

#### MACAM – MACAM STANDAR MONETER

Standar moneter pada hakikatnya dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu : standar barang dan standar kepercayaan.

##### **1. Standar Barang (Commodity Standard)**

Standar barang adalah sistem moneter di mana nilai uang dijamin sama dengan berat barang tertentu (emas atau perak). Dan setiap nilai uang yang beredar dijamin dengan barang tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

**Standar barang ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:**

**a. Standar emas (the gold standard) :** standard emas didefinisikan sebagai suatu system moneter dimana suatu bangsa menyatakan kesatuan moneternya dengan emas, bebas memperjualbelikan emas dengan harga yang pasti dan mengizinkan orang-orang untuk mengimpor dan mengeksport emas tanpa batas.<sup>60</sup>

**Ada 4 macam standard emas, yaitu :**

1. The Gold Coin Standard : Dalam standard emas ini ada beberapa persyaratan yaitu, pertama nilai satuan uang yang dikaitkan dengan

---

<sup>60</sup> Lindert, Peter. *Ekonomi Internasional*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1994). h 10 – 12.

seberat emas dan biasanya yang beredar adalah uang emas, misalnya U\$ 1 = 23,22 gram emas murni. Kedua pemerintah harus bersedia untuk melebur batangan emas menjadi uang emas untuk kepentingan masyarakat umum. Ketiga adanya hubungan yang tetap antara satuan moneter dengan sejumlah tertentu emas agar nilai satuan moneter sama dengan berat tertentu emas. Keempat adanya kebebasan bagi individu terhadap emas, apakah harus diekspor, disimpan atau digunakan untuk berbagai tujuan. Kelima uang emas dinyatakan sebagai alat pembayaran dan harus diterima umum didalam pembayaran. Ketujuh uang kredit pada umumnya hanya didukung oleh sebagian cadangan emas dan dapat ditebus dengan uang emas.

2. **The Gold Bullion Standard** : Standard ini agak berbeda dari yang sebelumnya dimana pemerintah menerima uang kredit untuk ditukarkan dengan emas. Tidak seperti pada “the gold coin standard”. Dimana dalam standard ini membuat batangan emas sebagai alat pembayaran hutang yang sah, baik oleh swasta maupun pemerintah, menyebabkan uang emas dapat ditarik dari peredaran untuk ditukarkan dengan batangan emas serta tidak ada kebebasan membuat emas.
  3. **The Meneged Bullion Standard** : Dalam standar moneter ini adanya sejumlah emas yang tetap ada pada setiap satu-satuan uang, tetapi tidak dipakai dalam peredaran umum. Oleh karena itu tidak ada pasar bebas untuk emas. Dalam undang-undang cadangan emas 1934 di Amerika memantapkan pemakaian standard ini. Peraturan ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menurunkan kadar emas dalam setiap satuan dollar agar merangsang kegiatan usaha melalui kenaikan harga yang diakibatkan oleh adanya devaluasi.
  4. **The Gold Exchange Standar** : Standar ini berkaitan dengan the gold coin ataupun the gold bullion standard. Sifat-sifat menonjol yang membedakan standard ini dari the gold coin dan the gold bullion standard adalah bahwa uang kertas dapat ditebus dengan sertifikasi emas pada suatu bank asing didalam suatu negara yang menganut the gold coin ataupun the gold bullion standard, sertifikasi-sertifikasi ini merupakan tagihan langsung pada cadangan emas atau investasi jangka pendek yang dimiliki oleh negara. Tetapi pemerintah atau Bank Sentral yang menganut penggunaan atas sertifikasi ini.<sup>61</sup>
- b. Standar perak (the silver standard)** : standard perak adalah suatu system standard moneter dimana suatu bangsa bebas memperjualbelikan perak dengan harga yang pasti dan mengizinkan seseorang untuk mengimpor dan mengeksport perak tanpa batas.

---

<sup>61</sup> Apridar. *Ekonomi Internasional*. (Jakarta : Graha Ilmu, 2010 ).h 56 -58.



Standard perak mempunyai kelebihan dan kekurangan yang sama dengan standard emas.

- c. **Standar kembar (emas dan perak)** : standard logam kembar (bimetallism standard) adalah suatu system peredaran uang yang didasarkan pada dua jenis mata uang yaitu mata uang standard emas dan mata uang standard perak. Besarnya perbandingan mata uang emas dan perak ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang.

## 2. Standar Kepercayaan

Standar Kepercayaan merupakan sistem moneter di mana nilai uang tidak dijamin dengan seberat tertentu barang, tetapi kepercayaan masyarakat dapat menerima uang sebagai alat pembayaran yang sah. Standard kepercayaan meliputi:

- a. **Standar Kertas** adalah sistem keuangan di mana uang kertas berlaku sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah dan tak terbatas, akan tetapi tidak ditukarkan dengan emas dan perak pada bank sirkulasi.
- b. **Uang Giral (Deposit Money)**

Deposito di Bank yang dapat setiap saat ditarik (dengan cek) dapat dikategorikan sebagai uang. Mengapa? Karena pertama, depositoini dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Caranya, pembayaran ini dilakukan dengan menulis cek., yakni transfer deposito dari si penulis /pembayar kepada si penerima pembayaran. Kedua Deposito ini dapat dipakai sebagai alat penumpuk kekayaan.

Seseorang atau suatu badan usaha dapat mewujudkan kekayaannya dalam bentuk deposito. Ketiga, deposit dapat dipakai sebagai alat pembayaran tertunda (deffered payment). Seseorang atau badan usaha dapat membayar utangnya tiap bulan dengan menulis cek atas depositonya di Bank. Karena deposito dapat memenuhi fungsi – fungsi uang, maka dapat dikategorikan sebagai uang. Dan bahkan makin maju suatu perekonomian jenis uang giral ini proporsinya terhadap jumlah total uang beredar makin besar. Di Amerika Serikat pada tahun 1983 jumlah uang giral meliputi kurang lebih  $\frac{3}{4}$  dari jumlah uang beredar., sisanya (yang  $\frac{1}{4}$ ) berupauang kartal (uang kertas dan logam).

- c. **Uang Kuasi**

Uang kuasi terdiri atas deposito berjangka dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik. Apabila kriteria uang didasarkan pada fungsinya, maka sebenarnya tabungan ini tidak masuk dalam pengertian uang. Namun, ada yang berpendapat bahwa seseorang itu dapat mewujudkan kekayaannya dalam berbagai bentuk seperti : tanah, rumah, uang, perhiasan, dan bahkan berbentuk tabungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mahendra, 2008, *Analisis kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*
- Adiwarman A. Karim. 2014, *Ekonomi makro islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Adiwarman Azwar Karim, 2001, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIT
- Akhsanul Haq dan Andir Muniroh, 2015, *Analisis Pengelolaan Valuta Asing Terhadap Profitabilitas Pt Garuda Indonesia (Persero) Tbk*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, Vol.1, No.2
- Apridar, 2010, *.Ekonomi Internasional*, Jakarta : Graha Ilmu
- Aulia Pohan, 2008, *Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Aulia pohan, 2008, *Potret kebijakan moneter indonesi*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO
- Aulia Pohan, 2017, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Aulia Pohan. 2019, *Teori dan implementasi kebijakan Moneter*.Rajawali press
- Azhari Akmal Tarigan, 2019, *“Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi ”*, Medan: FEBI UIN-SU Press
- Boediono, 1998, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu EKonomi No. 5 Ekonomi Moneter*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Boediutomo, dkk. 2000, *Ekonomi Moneter*.Pustaka Binaman Prasindo, Yogyakarta
- Corvia Maulidya, 2012, *“Analisis Pasar Uang Antar Bank di Indonesia”*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.10, No.1
- Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani dan Michael G. Febri, 1999, *Pasar dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat
- <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan+Kebijakan+Moneter.ac.aid>.
- Imam Mukhlis, 2015, *Ekonomi Keuangan dan Perbankan teori dan aplikasi*, Jakarta Selatan : Salemba Empat
- Imamudin Muliadi, 2019, *Teori Ekonomi Makro Islam* Depok: Rajawali Pers
- Imamudin Yuliadi, 2019, *Teori Ekonomi Makro Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Imamudin Yuliadi, 2019, *TeoriEkonomiMakro Islam* ,Depok: Rajawali Pers
- Jeff Madura, 2007, *Pengantas Bisnis edisi 4*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Justitia Islamica, *Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-prinsip Islam*. Vol. 10 No. 1, Juni 2013
- Karhi Nishar dan Winard, 1997, *Ilmu Ekonomi*, Bandung: CV Mandar Maju
- Kasmir, 2012, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir, 2014, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: Prenada Media
- Lindert, Peter. 1994, *Ekonomi Internasional*.Jakarta : Bumi Aksara
- M. Natsir, 2014, *Ekonomi Moneterdan Kebanksentralan*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- M. Umer Chapra, 2000, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta : Gema Insani Press

- Masyhuri machfudz, 2015, *Dekonstruksi model ekonomi islam*, Malang: MALIKI PRESS
- Maulana Hamzah, "Optimalisasi Peran Dual Banking System Melalui Fungsi Strategis JUB dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia", *La\_Riba*, Vol 3, No 2, Desember 2009
- Moh.Ali Wafa, 2017, "*Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah*", *Kordinat*, Vol.XVI, No.2
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah*, Jakarta : Gema Insani
- Muhammad, 2002, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Salemba Emban Patria
- Naf'an, 2014, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nopirin, 2000, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2000
- Nursantri Yanti, 2018, "*Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah*", *At-Tawassuth*, Vol.3, No.1
- Paul A Samuelson dan William D. Nordhaus,, 1986, *Ekonomi Jilid Kedua*, Jakarta: Erlangga
- Perry Warjiyo dan Doddy Zulverdi, *Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter Di Indonesia*
- Sadono Sukirno, 2000, *Makroekonomi Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Solikin M. Juhro, dkk. 2018, *Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda Teori dan Praktik*, Jakarta : Tazkia Publishing,
- Solikin, dkk. 2018, *Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda.*, Jakarta: Tazkia Publishing
- Sri Sudiarti, 2018, *fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan:FEBI Press
- Sulham Wijaya, *Peranan Bank dalam Pasar Uang*, diakses dari <http://sulhamwijaya.blogspot.com/2014/10/peranan-bank-dalam-pasar-uang.html> , pada Oktober 2014 pukul 18.55
- Teguh Pudjo Mulyono, 1996, *Bank Budgeting Profit Planning & Control*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Thamrin Abdullah, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Yenni Samri Juliati Nasution. 2018, *Pengantar ilmu ekonomi*, Medan : FEBI Press